

LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**



**BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Palembang**

LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG 2023




BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Palembang

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2023

No.Publikasi : 16710.2301

Katalog : 1202059.1671

Ukuran Buku : 21x29.7 cm

Jumlah Halaman : vii+110 Halaman/Pages

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS - Statistics Indonesia



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban atas akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang dalam pencapaian visi dan misi di tahun anggaran 2023. Laporan ini disusun sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPRRI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengacu pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini sebagai bentuk kepatuhan BPS Kota Palembang terhadap peraturan pemerintah, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Laporan Kinerja ini berisikan capaian kinerja selama tahun 2023, perkembangan capaian kinerja tahun 2020 s.d 2023, perbandingan realisasi Renstra 2020-2024, analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja, prestasi dan inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2023, kegiatan prioritas BPS Kota Palembang, Realisasi dan Efisiensi Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2023. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan program dan kegiatan ditahun yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kota Palembang mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini sangat kami hargai.

Palembang, 9 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG



YUDHISTIRA ARYA NOEGRAHA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	iv	
Daftar Lampiran	v	
Ringkasan Eksekutif	vi	
Bab I	Pendahuluan	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
	1.3 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran	6
	1.4 Potensi dan Permasalahan	11
	1.5 Sistematisasi Penyajian Laporan	13
Bab II	Perencanaan Kinerja	
	2.1 Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang	15
	2.2 Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024	20
	2.3 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2023	21
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
	3.1 Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2023	24
	3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023	58
	3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Periode Renstra 2020-2024	60
	3.4 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja	66
	3.5 Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2023	69
	3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang 2023	72
	3.7 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	86
Bab IV	Penutup	
	4.1 Tinjauan Umum	95
	4.2 Tindak lanjut	96
Lampiran-lampiran		
	1 Reviu Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024	
	2 Perjanjian Kinerja 2023	
	3 Pengukuran Capaian Kinerja 2023	
	4 SDM BPS Kota Palembang	
	5 Kegiatan BPS Kota Palembang	
	6 Response Rate Survei 2023	
	7 Judul Publikasi	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2023	viii
Tabel 2	: Kecamatan di Kota Palembang	5
Tabel 3	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang	7
Tabel 4	: Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	8
Tabel 5	: Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2023	8
Tabel 6	: Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2023	9
Tabel 7	: Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024	17
Tabel 8	: Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Tahun 2020-2024	21
Tabel 9	: Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2023	22
Tabel 10	: Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2023	25
Tabel 11	: Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang	28
Tabel 12	: Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2023	37
Tabel 13	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2023	47
Tabel 14	: Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2023	51
Tabel 15	: Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2023	59
Tabel 16	: Realisasi Kinerja Renstra 2020 s.d 2023	61
Tabel 17	: Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	63
Tabel 18	: Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Renstra 2023 Terhadap target Renstra 2024	65
Tabel 19	: Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum dan Usaha Pertanian Lainnya di Kota Palembang	74
Tabel 20	: Target dan Realisasi Sampel Survei E-Commerce 2023	81
Tabel 21	: Rekap Pemutakhiran Sampel Rumah Tangga Ubinan	83
Tabel 22	: Target dan Realisasi Sampel Ubinan Padi	84
Tabel 23	: Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2023	87

Tabel 24	: Potensi Penghematan BPS Kota Palembang Tahun 2023	88
Tabel 24	: Capaian Kinerja, Realisasi dan Nilai Efisiensi berdasarkan Tujuan dan Sasaran	91
Tabel 24	: Penurunan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terhadap Tahun 2022	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan	7
Gambar 2	: Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2023	11
Gambar 3	: Persentase Konsumen di PST BPS Kota Palembang yang berasal dari K/L/ OPD menggunakan data BPS untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Nasional	27
Gambar 4	: Publikasi BPS Kota Palembang yang menerapkan standar akurasi	36
Gambar 5	: Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2023	42
Gambar 6	: Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2023	46
Gambar 7	: Ruang Pelayanan Statistik Terpadu	54
Gambar 8	: Penandatanganan MOU Pojok Statistik di Universitas Bina Dharma Palembang	55
Gambar 9	: Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pojok Statistik	56
Gambar 10	: Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan BPS	57
Gambar 11	: Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023	58
Gambar 12	: Kegiatan Forum Konsultasi Publik	77
Gambar 13	: Pengumpulan dan Pengawasan Data Statistik E-Commerce	81
Gambar 14	: Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023	88
Gambar 15	: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPS Kota Palembang Tahun 2023 pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan	89
Gambar 16	: Perbandingan Nilai Evaluasi Kinerja (Smart) BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Rencana Strategis BPS Kota Palembang 2020-2024	98
Lampiran 2	: Perjanjian Kinerja (PK) 2022	99
Lampiran 3	: Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang	102
Lampiran 4	: Sumber Daya Manusia BPS Kota Palembang	103
Lampiran 5	: Kegiatan BPS Kota Palembang 2022	104
Lampiran 6	: Response Rate Survei BPS Kota Palembang	106
Lampiran 7	: Jumlah Publikasi BPS Kota Palembang	109



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki peran sebagai penyedia statistik, pemegang amanah dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, BPS harus memperhatikan dinamika perstatistikan baik nasional maupun internasional. Seiring dengan semangat Reformasi Birokrasi Nasional, sesuai visinya BPS bertekad untuk menjadi **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** (*“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”*)

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan yang ditetapkan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan,
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN,
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Pada Tahun 2023 BPS Kota Palembang mendapat anggaran awal sebesar Rp. 18.378.781.000,- dan direvisi sebanyak 13 kali dengan pagu akhir sebesar Rp. Rp.15.057.583.000,- atau berkurang sebesar Rp.3.321.198.000,-. Pengurangan ini disebabkan realokasi anggaran Automatic Adjustment. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 2 program. Pagu paling besar dialokasikan untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp. 7.887.693.000,- atau 52,37 persen dari total anggaran BPS Kota Palembang dengan penyerapan anggarannya sebesar Rp. 7.846.363.395,- atau 99,48 persen . Selanjutnya program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 7.169.890.000,- (47,63%), dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.134.596.807,- atau 99,51 persen .

Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 s.d 2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	110	110	100	100
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	110	100	100
1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	120	120	100	100
1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	100	110	114,79
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	100	110	114,79
2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	120	120
2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	100	100	100	109,59
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100	100	108,33	120
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	100	100	108,33	120
3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	100	100	108,33	120
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,94	108,74	99,97	102,64
4.1. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	101,94	108,74	99,97	102,64
4.1.1. Hasil penilaian implementasi SAKIP	101	99,83	99,94	105,28
4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	102,88	117,65	100	100
Total	102,88	105,35	104,04	107,84

Apabila dilihat dari capaian kinerja selama tahun 2020 s.d 2023 terlihat bahwa BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai tujuannya. Selama 4 tahun BPS Kota Palembang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 dan 2022 hanya terdapat 1 indikator yang belum mencapai tujuan yaitu indikator Hasil penilaian implementasi SAKIP, namun selama 4 tahun tersebut BPS Kota Palembang berhasil meningkatkan nilai SAKIP hingga menjadi 74,75 poin di tahun 2023.

Capaian kinerja tertinggi terlaksana pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 107,84 persen. Tujuan pertama “Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan nilai capaian kinerja 100 persen. Masing- masing indikator kinerja sebesar 100 persen.

Tujuan kedua “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” yaitu dengan nilai capaian kinerja 114,79 persen. Iku 2.1.1. dengan capaian kinerja 120 persen. Jumlah OPD yang mendapatkan rekomendasi statistik yaitu sebanyak 19 OPD dari target 7 OPD. Iku 2.1.2. dengan capaian kinerja 109,59 persen. Jumlah OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar yaitu sebanyak 12 OPD dari target 11 OPD.

Tujuan ketiga “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” dengan capaian kinerja 120 persen. Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan statistik sebanyak 53 OPD dari target 30 OPD. Pembinaan statistik dilaksanakan dalam bentuk FGD Publikasi Palembang Dalam Angka pada tanggal 22 Februari 2023 di Hotel Beston Palembang. Materi yang dibahas dalam FGD tersebut yaitu Pembahasan Data Daerah Dalam Angka Kota Palembang, Metadata, Pembinaan Rekomendasi Statistik serta sosialisasi EPSS Tahun 2023.

Tujuan keempat “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi” dengan capaian kinerja 102,64 persen. Indikator kinerja pada tujuan 4 ada 2 yaitu hasil penilaian implementasi SAKIP dengan capaian kinerja 105,28 persen dan persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS dengan capaian kinerja 100 persen.

Inovasi yang dibangun oleh BPS Kota Palembang sangat membantu pencapaian tujuan dimaksud. Bagi pemerintah atau OPD WhatsApp Bot bermanfaat mempersingkat waktu untuk mendapatkan informasi statistik terkini dan akses lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan konsultasi statistic sehingga dapat mereka gunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional.




BABI. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik mengamanatkan BPS bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyedia data atau informasi sekaligus sebagai koordinator perstatistikan di Indonesia. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian, atau masyarakat, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pada tahun 2023 BPS Kota Palembang melaksanakan 6 kegiatan prioritas nasional yaitu Pendataan Disagregasi PMTB, Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi, Survei *E-Commerce*, Sensus Pertanian, Statistik Tanaman Pangan dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi maka, pada Tahun 2023 dilaksanakan verifikasi data Regsosek dilanjutkan dengan kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dimulai pada bulan Mei 2023. Periode berikutnya BPS Kota Palembang kembali melaksanakan Sensus Pertanian 2023. Sensus Pertanian merupakan sebuah upaya untuk memotret dengan akurat dan komprehensif keadaan sektor pertanian di Kota Palembang. Sensus Pertanian ini dilaksanakan pada Juni dan Juli 2023. Data Sensus Pertanian ini merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kegiatan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, BPS selalu berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna data dalam memproduksi dan menyajikan data statistik. Hal tersebut merupakan suatu keharusan sebagai lembaga publik penyedia data dan informasi statistik sekaligus sebagai wujud tanggung jawab dan amanat pemerintah yang diemban. Melalui *Advance Release Calendar* (ARC) terangkum publikasi dan berita resmi statistik yang akan terbit pada tahun yang bersangkutan. ARC tersebut disajikan pada *website* BPS Kota Palembang. Publikasi yang diterbitkan di *website* BPS Kota Palembang yaitu Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2023, Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023,




Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Palembang 2023 ,Statistik Daerah Kota Palembang 2023, Kota Palembang Dalam Angka 2023, PDRB Kota Palembang menurut Lapangan Usaha 2018-2022, dan PDRB Kota Palembang menurut pengeluaran Tahun 2018-2022. Dan wujud dari kerja keras dan kerja cerdas Tim BPS Kota Palembang, pada Rakorda Tahun 2023 memperoleh beberapa penghargaan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Kinerja Anggaran Terbaik BPS Kabupaten/Kota dan satker dengan predikat pengguna aplikasi Backoffice Selindo Terbaik ke Tiga di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang di amanahkan, BPS Kota Palembang telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis,tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun. Pada awal tahun BPS Kota Palembang telah Menyusun Perjanjian Kinerja. Target kinerja yang telah ditetapkan diukur capaiannya dan dipantau secara periodik setiap bulan, triwulanan dan tahunan. Pada akhir tahun dapat diketahui hasil akhir pencapaian target dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran BPS akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Palembang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konsitutional BPS yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam



undang-undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistic dasar. BPS sedang berada dalam masa transisi, mendukung kebijakan pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi, mengurangi tingkat eselon untuk kemudian dialihkan ke jabatan yang bersifat fungsional secara bertahap. Menggunakan dasar hukum Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, dan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, pada masa transisi ini. Mengingat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 baru ditetapkan pada 17 Desember 2020.

Kedudukan BPS Kota Palembang adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala. Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi.


1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Bab III Bagian Kesatu pasal 10 disebutkan bahwa BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan statistic dasar di Kota Palembang.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Palembang.
3. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistic di Kota Palembang.

- 
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Kota Palembang.

3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Palembang, yaitu:

1. Kepala

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang mempunyai tugas memimpin BPS Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang serta membina aparatur BPS agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, hukum dan organisasi, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan dan rumah tangga.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

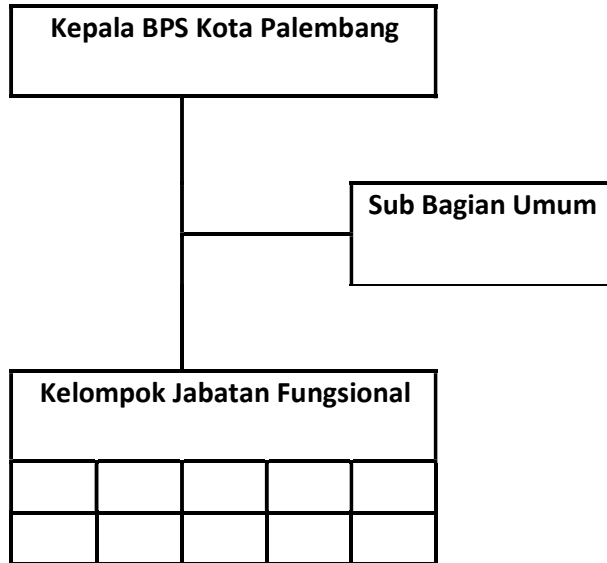
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Provinsi dan BPS Kota Palembang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

5. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BPS Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Kota Palembang.

6. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Secara rinci bagan organisasi BPS Kota Palembang:



Wilayah administrasi kerja BPS Kota Palembang yang menjadi tanggung jawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yaitu 18 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Kecamatan di Kota Palembang

No	Kode	Kecamatan
1.	010	Ilir Barat Dua
2.	011	Gandus
3.	020	Seberang Ulu Satu
4.	021	Kertapati
5.	022	Jakabaring
6.	030	Seberang Ulu Dua
7.	031	Plaju
8.	040	Ilir Barat Satu
9.	041	Bukit kecil
10.	050	Ilir Timur Satu
11.	051	Kemuning
12.	060	Ilir Timur Dua
13.	061	Kalidoni



14.	062	IlirTimurTiga
15.	070	Sako
16.	071	Sematangborang
17.	080	Sukarami
18.	081	Alang-AlangLebar

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Palembang dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:

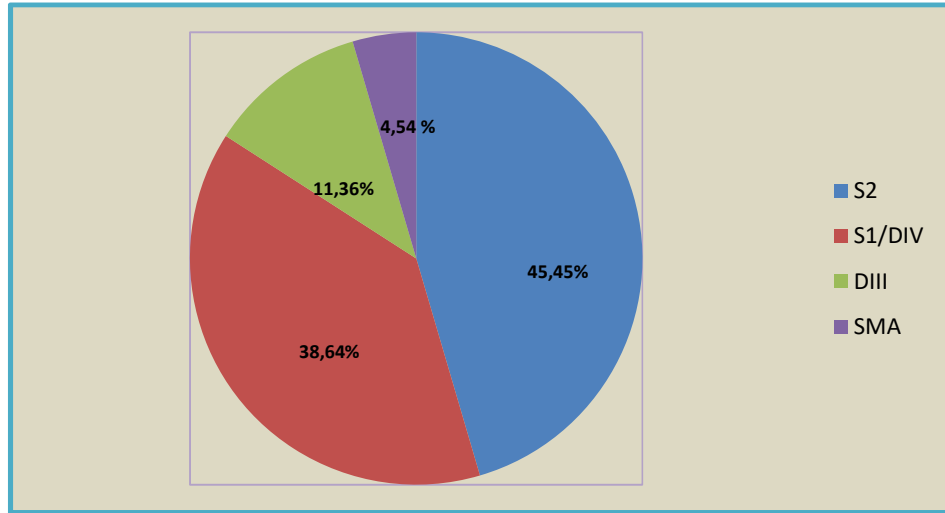
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistic baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistic akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistic dasar.
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Sumber daya manusia adalah salah satu asset organisasi yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Kondisi ASN di lingkungan BPS Kota Palembang sampai dengan akhir tahun 2023 berjumlah 44 orang yang terdiri dari 20 orang yang berpendidikan S2, 17 orang pegawai berpendidikan S1/D-IV, 2 orang pegawai yang berpendidikan D-3 dan 5 orang yang berpendidikan SMA. Dari gambaran ini, dapat diperoleh informasi bahwa komposisi pendidikan ASN di BPS Kota Palembang didominasi oleh lulusan S2 sebanyak 45,45 persen dan lulusan S1/D-IV sebanyak 38,64 persen, lulusan SMA sebanyak 11,36 persen. Sedangkan untuk pegawai berpendidikan D-III hanya sebesar 4,54 persen dari total pegawai BPS Kota Palembang. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat menentukan kinerja suatu instansi.



Gambar 1. SDM BPS Kota Palembang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, terdapat perubahan susunan organisasi di BPS Kota Palembang menjadi 2 pejabat struktural yang terdiri dari Eselon III (Kepala) dan Eselon IV (Kasubbag Umum), serta Kelompok Jabatan Fungsional. Komposisi pegawai BPS Kota Palembang menurut jabatan sebagai berikut:

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang

Jabatan	Jumlah (Orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Pejabat Struktural	2	2	4,54	0	0,00
2. Pejabat Fungsional Tertentu	33	11	25,00	22	50,00
3. Pejabat Fungsional Umum	9	3	6,81	6	13,65
Jumlah	44	17	36,35	30	63,65

Berdasarkan Peraturan Kepala (PERKA) BPS Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui Penyesuaian/Inpassing, pada tahun 2023 terdapat 2 pegawai yang mengikuti ujian



kompetensi statistisi dan dinyatakan lulus. Selain itu, terdapat mutasi masuk 1 fungsional tertentu, yaitu statistisi ahli muda. Sehingga pada Tahun 2023 pegawai yang menduduki jabatan fungsional sebanyak 33 orang atau 75 persen dari seluruh pegawai yang terdiri dari 1 orang Statistisi Madya, 12 orang Statistisi Ahli Muda, 2 orang Pranata Komputer Ahli Muda, 13 orang Statistisi Ahli Pertama, 1 orang pranata komputer ahli pertama , 1 orang Penyelia, dan 2 orang Statistisi Pelaksana Lanjutan/Mahir dan 1 Pranata Keuangan APBN Terampil.

Tabel 4 . Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	8	18,18
III	35	79,54
II	1	2,28
Jumlah	44	100,00

Tabel 5. Komposisi Pegawai BPS Kota Palembang Menurut Usia Tahun 2023

Usia	Jumlah (orang)	Persentase
>50	7	15,91
41-50	14	31,82
31-40	18	40,91
≤ 30	5	11,36
Jumlah	44	100,00

Sampai dengan kondisi Desember 2023, sebanyak 3 orang pegawai sedang menjalani tugas belajar pada Universitas Terbuka pada jenjang pendidikan S1 dan 1 pegawai yang sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan

Pada awal tahun sesuai DIPA-054.01.1.428227/2022, BPS Kota Palembang menerima pagu sekitar Rp. 18.378.781.000,- dalam rupiah murni. Anggaran tersebut untuk membiayai kegiatan yang terbagi dalam 2 program. Pagu paling besar dialokasikan

untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp. 11.656.864.000,- atau 63,42 persen dari total anggaran BPS Kota Palembang. Selanjutnya program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 6.721.917.000,- (36,57%).

Pada tahun 2023, BPS Kota Palembang melakukan revisi DIPA sebanyak 13 kali. Pagu akhir BPS Kota Palembang sebesar Rp.15.057.583.000,- atau berkurang sebesar Rp.3.321.198.000,-. Pengurangan ini disebabkan realokasi anggaran Automatic Adjustment.


Tabel 6. Alokasi Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2023
(dalam jutaan rupiah)

Program	Pagu Awal (Rp)	% thd Pagu Awal Total	Pagu Akhir (Rp)	% thd Pagu Akhir Total
(1)	(2)			(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMP TTL)	6.721.917.000	36,57	7.169.890.000	47,63
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	11.656.864.000	63,42	7.887.693.000	52,37
Total	18.378.781.000	100	15.057.583.000	100

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Kota Palembang, yang terdiri dari output sebagai berikut:

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal
3. Layanan Manajemen Kinerja Internal

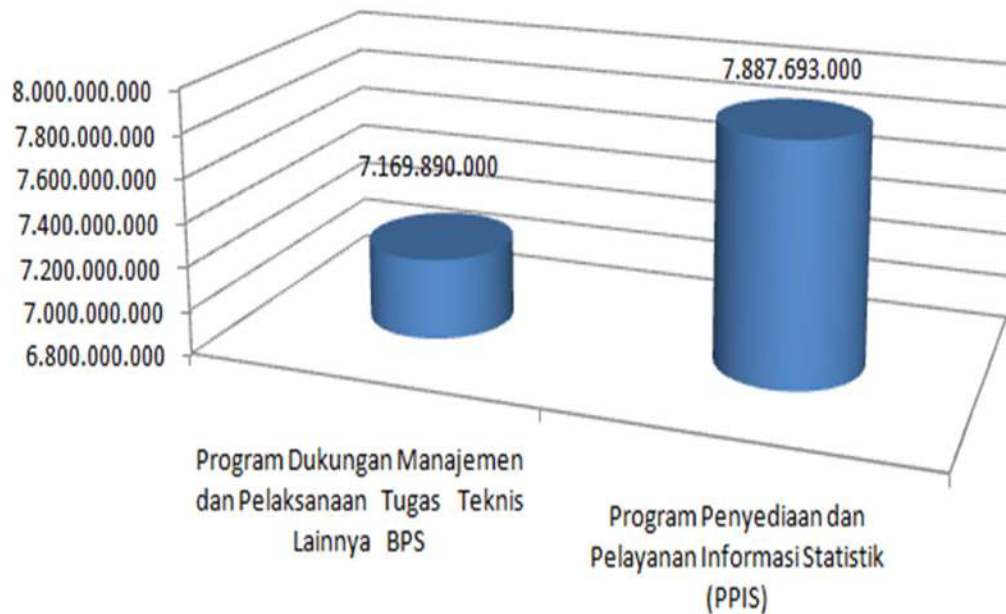
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam



rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS Kota Palembang secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 adalah penyediaan dan pelayanan informasi statistik yang komponennya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
2. Diseminasi dan Metadata Statistik
3. Statistik Neraca Pengeluaran
4. Statistik Neraca Produksi
5. Metodologi Sensus dan Survei
6. Statistik Distribusi
7. Statistik Harga
8. Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi
9. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
10. Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan
11. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
12. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
13. Statistik Ketahanan Nasional
14. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi
15. Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata
16. Statistik E-Commerce
17. Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan
18. Statistik Hortikultura dan Perkebunan
19. Sensus Pertanian
20. Statistik Tanaman Pangan
21. Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area


- Gambar 2. Pagu Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2023



1.4. Potensi dan Permasalahan

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan badan pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Data yang berkualitas sangat membantu Pemerintah dalam menghasilkan keputusan/kebijakan yang tepat. Peranan data statistic sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah.

Penyebarluasan data BPS kepada masyarakat menjadi sorotan utama pihak luar, baik oleh sesame instansi pemerintah, swasta, maupun Masyarakat umum. Oleh sebab itu, penyajian dan penyebarluasan data perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pintu gerbang penyebarluasan data BPS adalah Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Melalui PST konsumen data (mahasiswa, peneliti,




pemerintah, masyarakat, pelajar, dan lain-lain) dapat memperoleh data yang diperlukan baik untuk skripsi, tugas sekolah dan kuliah, untuk pengambilan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

Adapun potensi yang dimiliki BPS Kota Palembang yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, antara lain:

- Tersedianya 44 pegawai dengan kualifikasi Pendidikan hampir 90 persen lulusan perguruan tinggi.
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan pengolahan dan diseminasi data yang berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi)
- Tersedianya anggaran pemeliharaan dapat dimaksimalkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, sehingga dapat mendukung kenyamanan pegawai dan pengguna data
- Dukungan dari Pemerintah Kota Palembang dalam setiap kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan dilapangan.

Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi tantangan untuk meningkatkan peran BPS Kota Palembang sebagai badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak. Tantangan perubahan yang dihadapi BPS Kota Palembang antara lain:

1. Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistic semakin meningkat.
2. Proses bisnis survei-survei belum terencana dengan baik, dimana jadwal survei yang sifatnya tahunan sering menumpuk dalam 1 waktu, sehingga terkendala dalam penyiapan SDM dan persiapan lapangan lainnya.
3. Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistic wilayah kecil, termasuk data mikro
4. Kurangnya pemahaman Masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS
5. Ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS terutama untuk Masyarakat yang tinggal dikawasan elit.
6. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar,



menyebabkan kualitas data dan response rate rendah.

7. Koordinasi antara BPS Kota Palembang dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan supaya peran BPS sebagai pembina statistik sektoral akan semakin baik.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang selama Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) 2023 dan Rencana Strategis 2020-2024 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diLingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang ; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; wilayah administrasi; sumber daya manusia di BPS Kota Palembang; potensi dan permasalahan yang dihadapi; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPS Kota Palembang yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang terdiri dari Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2023; Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota



Palembang tahun 2020 s.d 2023, Perbandingan realisasi Renstra 2020-2024; Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja; prestasi dan inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2023; kegiatan prioritas BPS Kota Palembang; Realisasi dan Efisiensi Anggaran BPS Kota Palembang

BabIV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2023 dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BABII. PERENCANAAN KINERJA


2.1. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Palembang

Reformasi birokrasi di Indonesia intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya Tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal, diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan system *rewar dan punishment*, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, danlain-lain.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, kendala, maupun tantangan yang mungkin terjadi, BPS Kota Palembang melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di BPS Kota Palembang.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistic yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperandalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistic yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan



yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan Pemerintah menyajikan informasi yang objektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kota Palembang perlu Menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *goodgovernment* dan *clean government* tersebut.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistic pada Tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses Masyarakat terhadap data dan informasi;
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistic dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS Kota Palembang untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing ”sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Berdasarkan misi Pembangunan nasional tersebut BPS Kota Palembang menetapkan visi tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi BPS RI : “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju (*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*)”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Palembang yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kota Palembang dirumuskan sebagai berikut pada Tabel :

Tabel 7. Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Palembang 2020-2024

VISI BPS KOTAPALEMBANG 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju di BPS Kota Palembang	MISI BPS KOTA PALEMBANG 2021 –2024	
		1.	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2.	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3.	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4.	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah


Misi BPS Kota Palembang tahun 2020-2024 mengandung arti:

- 1) Menyediakan statistic berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.

Kualitas suatu output statistic dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009:187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistic yang digunakan oleh BPS, meliputi:

1. *Relevance* (relevansi)
2. *Accuracy* (akurasi)
3. *Timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu)
4. *Acessibility* (aksesibilitas)
5. *Coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan)
6. *Interpretability* (interpretabilitas)

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kota Palembang akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.



2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistic yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional. Tujuan utama dalam pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat. Parasuraman (2001) menyatakan bahwa terdapat lima unsur penting yang menentukan kepuasan yaitu *responsiveness*, *assurance*, *tangible*, *empathy*, dan *reliability*. BPS Kota Palembang telah mengadakan Survei Kebutuhan Data untuk mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta memberikan pelayanan yang baik.

4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik harus terus dilakukan.

Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi, maka BPS Kota Palembang memiliki tujuan. Tujuan dalam Rencana Strategis BPS Kota Palembang adalah suatu keadaan yang akan dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang ditetapkan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kota Palembang memiliki empat tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai 2024. Tujuan BPS Kota Palembang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.

Tujuan 1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Indikator Tujuan 1: Meningkatnya Pemanfaatan data statistic yang berkualitas

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional
2. Persentase publikasi statistic yang menerapkan standard akurasi

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN

Indikator Tujuan 2 : Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sectoral sesuai standar

Tujuan 3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Indikator Tujuan 3: Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I

Mencakup satu sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan pembinaan statistik

Tujuan 4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Indikator Tujuan 4 : SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan

Mencakup dua sasaran strategi yang ditetapkan, yaitu:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya, BPS Kota Palembang menetapkan arah kebijakan seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistic sectoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas data statistic melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru
2. Meningkatnya layanan statistic melalui *multi channel dissemination*
3. Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar
4. Meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*

2.2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Palembang 2020-2024

Dalam melakukan tugasnya selama lima tahun, BPS Kota Palembang telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 yang mengacu pada Renstra BPS RI tahun 2020-2024. Pada awal tahun 2022, BPS Kota Palembang melakukan reuiu Renstra BPS Kota Palembang untuk periode 2020- 2024. Renstra BPS Kota Palembang tahun 2020-2024 disusun sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga diharapkan

pelaksanaan program dan kegiatan di BPS Kota Palembang menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Tabel 8. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	58,28*	75*	100	100	100	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi			100	100	100	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik			41	50	50	Fungsi IPDS
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadada sektoral sesuai standar			76	76	76	Fungsi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)			92	92	92	Fungsi IPDS, Stat. Distribusi, Stat. Produksi, Stat. Sosial, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	69	70	70	70	71	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Propinsi	80	85	100	100	100	Subbagian Umum

* Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indicator


2.3. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Palembang Tahun 2023

Pada awal tahun 2023 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi BPS Kota Palembang yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai Lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan Reviu Perjanjian Kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kota Palembang, yang disusun dengan didasarkan pada Peraturan

Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Target yang dicanangkan menjadi tolak ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun 2023.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistic yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan dataBPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi Pembangunan nasional(%)	Persen	100
	Persentase publikasi yang menerapkan standard akurasi(%)	Persen	100
2. Meningkatkan kolaborasi, Integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistic (%)	Persen	53
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	84
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sectoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	96
4. Penguatan tatakelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistic yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	71
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS(%)	Persen	100



Sebagai perwakilan BPS RI di daerah, BPS Kota Palembang fokus menyediakan datadan informasi statistik yang berkualitas, dengan kata lain kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indicator kinerja semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data dan informasi yang berkualitas demi mendukung visi BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.



BABIII. AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan system pengukuran kinerja, pemerintah telah membuat sistem pengukuran kinerja dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil monitoring capaian kinerja digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Dengan demikian diharapkan kendala yang ditemui dalam pencapaian tujuan dan sasaran BPS Kota Palembang dapat diantisipasi lebih awal.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2023

Capaian kinerja BPS Kota Palembang 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategi selama tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2023 dan data realisasinya dapat diperoleh.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Palembang pada tahun 2023, yaitu:

1. Menyediakan data statistic untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Secara keseluruhan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang tahun 2023 menunjukkan

keberhasilan yang signifikan dengan nilai capaian kinerja sebesar 107,84 persen. Peningkatan yang sangat tinggi yaitu pada indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari target 7 OPD dengan realisasi 19 OPD, terdapat 12 OPD yang melebihi dari target yang ditetapkan. Indikator lain yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik dengan target 30 OPD atau 96 persen, BPS Kota Palembang mampu melakukan pembinaan statistik terhadap 53 OPD atau sebesar 170,96 persen, meningkat dari target 76,67 persen.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Data statistik yang berkualitas dengan indikator:

1. Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional.
2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi

Tabel 10. Capaian Kinerja Tujuan Pertama BPS Kota Palembang Tahun 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional	Persen	100	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama					100

Dari tabel di atas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100 persen. Sasaran strategis tujuan pertama terdiri dari 2 indikator dan masing-masing indikator telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Pertama Sasaran Strategis Pertama diperoleh

berdasarkan hasil survei kebutuhan data tahun 2023 dengan rumus :

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

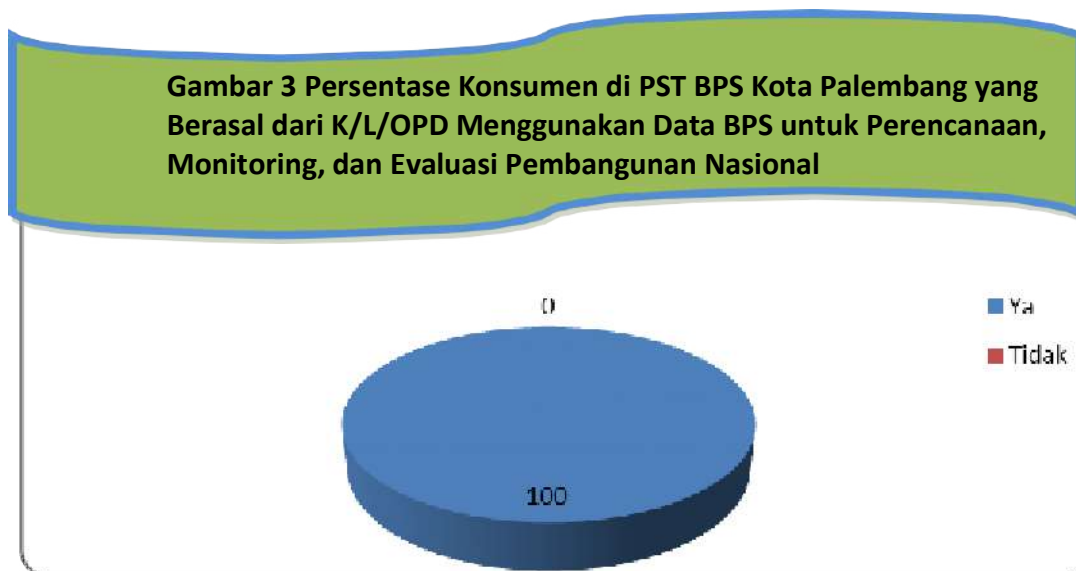
P = Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi
x = Jumlah konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi
y = Jumlah seluruh konsumen

Perencanaan Pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Monitoring yaitu mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi Pembangunan adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi yang sedang berlangsung atau yang telah selesai.

Sejalan dengan visi BPS 2020-2024, yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS menyediakan data statistik untuk mendukung Indonesia Maju, baik dalam tahap perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan, terutama bagi pemerintahan. Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dilaksanakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Untuk menjawab kebutuhan hasil SKD, hasil kegiatan SKD disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kebutuhan data, dan analisis performa unit pelayanan dalam ruang lingkup PST BPS Kota Palembang. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kota Palembang yang rilis pada bulan Desember di website BPS Kota Palembang.

Pengguna data dapat mengakses data BPS terkini yang secara konsisten selalu di-*update*. Selain itu, BPS Kota Palembang juga menyusun Berita Resmi Statistik (BRS) dan

infografis untuk indikator-indikator penting ketika data tersebut sudah dirilis oleh BPS. BRS dapat diunduh diwebsite BPS Kota Palembang, sedangkan infografis dapat dilihat diInstagram dan website BPS Kota Palembang.



Berdasarkan hasil survei kebutuhan data dapat diperoleh hasil dari Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional adalah sebesar 100 persen sehingga capaian kinerjanya menjadi 100 persen. Pada Tahun 2023 BPS Kota Palembang telah mengembangkan inovasi Whats Bot. Selama ini, website pelayanan kurang dikenal oleh masyarakat pengguna data. Pengguna data lebih banyak melakukan konsultasi atau permintaan data melalui media sosial atau whatsapp langsung kepada pegawai BPS Kota Palembang. Untuk memfasilitasi hal tersebut sekaligus mempersingkat birokrasi dalam pelayanan statistik, BPS Kota Palembang menyediakan WhatsApp resmi pelayanan BPS Kota Palembang.

WhatsApp pelayanan ini merupakan layanan otomatis berbalas yang dapat diakses langsung oleh pengguna data. Adapun layanan yang dapat diakses melalui WA ini adalah pelayanan *whistle blower* (layanan pengaduan), informasi statistic terkini, konsultasi statistik, permintaan mikro data, dan lokasi kantor. Melalui media WA ini diharapkan dapat mempersingkat waktu pelayanan dan mempermudah pengguna data dalam mengakses produk-produk BPS, khususnya diwilayah Kota Palembang. Bagi

pemerintah atau OPD WhatsApp Bot ini bermanfaat mempersingkat waktu untuk mendapatkan informasi statistic terkini dan akses lebih mudah dan cepat dalam melakukan konsultasi statistic sehingga dapat mereka gunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional.

Berbagai macam produk statistik di BPS Kota Palembang diantaranya publikasi dan Berita Resmi Statistik dimaksudkan untuk memotret serta menyajikan indikator-indikator penting yang menggambarkan tentang kondisi daerah dalam bentuk tampilan uraian deskriptif. Dengan produk ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pemerintah daerah dan Masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan pembangunan serta membantu para pengguna data lainnya dalam memahami kondisi daerah. Data BPS Kota Palembang telah banyak digunakan oleh masyarakat baik oleh pemerintah daerah, akademisi, pihak peneliti dan sebagainya (dapat dilihat dari jumlah visitor *website*). Dari Tabel 11 terlihat jumlah visitor *website* BPS Kota Palembang selalu mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan menurun pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan pengguna data lebih banyak menggunakan whatsapp bot dalam pencarian data maupun konsultasi statistik sehingga jumlah pengunjung *website* mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2022 dan 2023, jumlah pengunjung *website* kembali mengalami peningkatan.


Tabel 11. Jumlah Pengunjung Website BPS Kota Palembang

Tahun	Jumlah Pengunjung
2018	37.139
2019	49.352
2020	54.594
2021	43.430
2022	51.847
2023	54.432



Kendala :

1. Berdasarkan hasil SKD 2023 konsumen data sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 78,13%. Sedangkan konsumen yang bekerja di BUMN/BUMD 9,38%, swasta 3,13 %, peneliti/dosen sebesar 3,13% serta pekerjaan utama lainnya sebesar 6,25%. Berdasarkan survei ini juga diperoleh informasi bahwa pemanfaatan utama hasil kunjungan adalah untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan di pemerintahan. Oleh karena itu, data yang disediakan oleh BPS harus mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. BPS Kota Palembang melakukan publisitas data rilis BPS melalui website BPS Kota Palembang agar dapat tersampaikan dengan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap pengunjung PST akan diarahkan untuk memanfaatkan website BPS ketika membutuhkan data. Akan tetapi, pengunjung PST terkadang mengharapkan *print out* langsung dari BPS dari pada data *soft file*. Pengunjung PST yang berasal dari K/L/OPD seringkali beranggapan seluruh data yang diminta tersedia di BPS, termasuk data sektoral yang sebenarnya dapat diperoleh dari OPD terkait.
2. Jadwal pendataan lapangan Susenas menggunakan skema 212, dimana target harian pendataan lapangan adalah 2 rumah tangga dan hari ke-3,6,9, dst adalah hari OFF.. Akan tetapi realisasinya belum sesuai dengan yang direncanakan, sehingga pemasukan dokumen ke pusat pengolahan belum mengikuti pola ban berjalan (menumpuk di akhir pendataan)
3. Penggunaan aplikasi SIEMAS sebagai pendamping pencacahan dan pemeriksaan dokumen Susenas masih mengalami banyak kendala ketika diaplikasikan pada saat pencacahan, sehingga memecah konsentrasi petugas saat mencacah dan memperlama proses pencacahan.
4. Terdapat instruksi BPS Provinsi Sumsel untuk melaksanakan pengecekan lapangan hasil PMT dan pengolahan data Regsosek
5. Error aplikasi ketika dilakukan pendataan sensus pertanian





Solusi :

1. BPS Kota Palembang melakukan publisitas data rilis BPS melalui website, serta memastikan kelengkapan dan update data website.
2. Memenuhi setiap undangan dari pihak eksternal dalam rangka mendukung Program Satu Data Indonesia
3. Memaksimalkan peran pengawas untuk aktif mengawal pendataan lapangan dan mengambil dokumen yang sudah selesai untuk segera diperiksa, sehingga dapat masuk ke pusat pengolahan secara ban berjalan.
4. Mendahulukan pendataan di Rumah Tangga yang bisa ditemui terlebih dahulu.
5. Menghubungi sampel rumah tangga melalui nomor HP salah satu anggota Rumah Tangga
6. Semua pegawai organik BPS Kota Palembang dibantu pegawai BPS Provinsi Sumsel melakukan verifikasi lapangan hasil PMT dan pengolahan data Regsosek serta membuat laporan hasil verifikasi lapangan. Dan hasil dari verifikasi lapangan ini terdapat penguraangan jumlah rumah tangga miskin.
7. Tim Teknis ST2023 mengakomodir error-error aplikasi ketika di lapangan untuk kemudian diteruskan ke Tim IT Pusat, selain itu petugas juga dibekali beberapa dokumen L2 untuk mengantisipasi aplikasi yang tidak dapat digunakan

Tindak lanjut :

1. Pengguna data dapat mengakses data terkini yang secara konsisten selalu di-*update*.
2. Bahan rilis dan seluruh produk data BPS Kota Palembang dapat diakses melalui website BPS Kota Palembang. Untuk publikasi statistik dapat di unduh di website BPS Kota Palembang pada link <https://palembangkota.bps.go.id/publication.html>
3. Tim Teknis agar ke depannya dapat mengimbau petugas untuk memanfaatkan fitur "Bantuan" di FASIH dan Tim IT FASIH di pusat dapat lebih tanggap kembali dalam mengatasi permasalahan ini

- 
4. Dalam rangka memenuhi permintaan data dari OPD yang mengajukan surat permohonan data, BPS Kota Palembang memberikan balasan surat permintaan data dan mengirimkannya lewat email
 5. Dalam rangka mempertahankan jumlah Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan, BPS Kota Palembang telah memenuhi undangan dari instansi :
 - Undangan rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka Pembahasan Analisis Rapat Determinan Inflasi Kota Palembang, dalam rapat dijelaskan tentang perkembangan tingkat inflasi Kota Palembang dan Komoditas dominan penyumbang andil inflasi Kota Palembang bulan Juni 2023.
 - Undangan rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka pembahasan Entry Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas). BPS Kota Palembang membahas tentang pentingnya satu data untuk pengukuran indeks ketahanan nasional.
 - Undangan rapat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka Validasi Data Tanaman Pangan Tahun 2023. Informasi yang disampaikan yaitu Luas panen padi Kota Palembang Tahun 2021-2022 dan s.d April 2023, Produksi padi Kota Palembang Tahun 2021-2022 dan s.d April 2023, dan produktivitas tanaman palawija Kota Palembang Tahun 2018-2022, target dan realisasi ubinan 2023, jumlah segmen KSA dan luas baku lahan sawah Kota Palembang.
 - Undangan rapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terkait Entry Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas).
 - Undangan rapat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Undangan dalam rangka kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota. Informasi yang disampaikan Sekilas angka tetap (Atap) Tanaman




hortikultura Kota Palembang Tahun 2022, Angka Sementara (Asem) Hasil KSA Padi 2023 , Tren angka sementara (Asem) produksi padi hasil KSA 2018-2023, Angka Sementara (Asem) hasil KSA padi 2023, tren angka sementara (Asem) Luas panen padi hasil KSA 2018-2023 dan Evaluasi SPH 2023

- Undangan rapat dari Walikota Palembang dalam rangka Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Kota Palembang Tahun 2025-2045. BPS Kota Palembang menyampaikan pencapaian indikator makro ekonomi Kota Palembang

Sensus Pertanian Tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang juga turut andil bagi pemerintah dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi. Tema ST2023 adalah “Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Tema ini memproyeksikan tujuan bahwa ST2023 mampu menghasilkan data yang berkualitas sehingga dapat menjadi landasan yang valid dalam perumusan kebijakan di bidang pertanian. Informasi yang dikumpulkan melalui ST2023 ini, antara lain jenis tanaman, luas lahan, teknik budidaya, dan profil petani berbasis nama dan alamat. Termasuk model irigasi, status kepemilikan tanah, struktur demografi petani (mencakup petani milenial), serta informasi UMKM dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Langkah perbaikan kedepan pada indikator “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional” BPS Kota Palembang menerapkan rencana aksi sebagai berikut

1. Tetap berkontribusi dalam setiap rapat yang diadakan oleh instansi lain baik sebagai narasumber ataupun peserta rapat dalam rangka memperkenalkan data BPS
2. Selama ini data inflasi hanya di upload di website BPS Kota Palembang dalam bentuk Berita Resmi Statisti (BRS). Tahun 2024 BPS Kota Palembang akan melakukan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) inflasi secara offline dan online melalui streaming kanal Youtube.



Indikator kedua Sasaran Strategis pertama yaitu Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Pada tahun 2023 BPS Kota Palembang menerbitkan 28 publikasi dan sebanyak 7 publikasi telah memuat data dan informasi terkait hasil standar akurasi.

Kriteria publikasi dikatakan menerapkan standar akurasi adalah:

- Publikasi tersebut memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi oleh PMSS.
- Publikasi tersebut memuat data hasil kompilasi, apabila ada bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi maka dianggap menerapkan standar akurasi.
- Publikasi tidak harus menampilkan RSE, cukup memuat indikator yang bersumber dari survei yang memenuhi standar akurasi.

Capaian kinerja ini sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen dan target 100 persen. Dalam rangka penyusunan publikasi tersebut BPS Kota Palembang berkoordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan mengenai data kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas, perumahan, konsumsi dan pengeluaran, penggunaan teknologi dan informasi, program perlindungan social dan estimasi sampling error.

Kendala :

Publikasi yang menerapkan standar akurasi adalah Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang dan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, Tahap 1 Kota Palembang. Dikarenakan data yang digunakan berasal dari Susenas Maret dan Sensus Pertanian tahun yang bersangkutan, maka publikasi ini hanya dapat diterbitkan pada akhir tahun. Tujuannya agar dapat menghadirkan publikasi dengan data yang paling update.

Solusi :

Untuk mengatasi keterlambatan rilis, maka template publikasi sudah dipersiapkan dari awal waktu dan tetap mematuhi jadwal rilis, serta memperhatikan kualitas data publikasi




Tindak Lanjut :

Publikasi statistik yang diterbitkan oleh BPS Kota Palembang dapat diakses pada website BPS Kota Palembang <https://palembangkota.bps.go.id/publication.html>. Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebanyak 7 publikasi, yaitu:

1. Palembang Dalam Angka 2023
2. PDRB Menurut Lapangan usaha 2018-2022
3. PDRB Menurut Pengeluaran 2018-2022
4. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2023
5. Statistik Daerah Kota Palembang 2023
6. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang
7. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap I Kota Palembang

Data dan informasi diperlukan dalam rangka mendukung proses perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil Pembangunan agar dapat berjalan dengan baik. Data mengenai keadaan sosial ekonomi dibutuhkan untuk memberikan gambaran pencapaian pembangunan dan juga dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi program-program pembangunan. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha bersumber dari data survei IBS bulanan, IMK Triwulanan, data PLN , PGN , LRA BPKAD, PT KAI, Simopple, Data Bandara, Realisasi Pajak, BRS untuk industri migas dan VHTS sedangkan publikasi PDRB Pengeluaran bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD , Seruti Triwulanan, Survei Khusus Lembaga Non Profit Ruta (SKLNPR) triwulanan dan Data Bulog. Data PDRB ini sangat dibutuhkan bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.



Selain itu pada tahun 2023 , BPS Kota Palembang juga menerbitkan publikasi Sensus Pertanian sebanyak 2 publikasi yaitu : Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, Tahap 1 Kota Palembang dan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, Tahap 1 Kota Palembang.

Informasi yang terkumpul melalui ST2023 kemudian diolah menjadi data struktur pertanian, potensi pertanian, pertanian perkotaan (*urban farming*) hingga geospasial statistik pertanian yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan penyusunan program pemerintah di bidang pertanian.

Bagi pelaku usaha pertanian, data yang bermutu akan sangat membantu untuk memproyeksikan potensi bisnis pada masa depan sekaligus mendeteksi risiko yang mungkin timbul. Di samping itu, tersedianya data yang lengkap dan akurat tentang tren jenis tanaman pertanian, pola tanam, sebaran ketersediaan pupuk, penggunaan bahan kimia, dan sebagainya bisa menjadi basis evaluasi untuk menciptakan model usaha pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

ST2023 juga memberi manfaat besar bagi para petani, khususnya petani milenial yang telah melek teknologi informasi dan komunikasi. Sebab, data dari ST2023 bisa dimanfaatkan secara optimal dengan bantuan kecerdasan buatan, pemetaan spasial, dan aplikasi analisis data untuk memprediksi pola dan tren pertanian modern yang akan datang. Termasuk untuk mengevaluasi sistem kerja yang telah dipraktikkan sebelumnya.

Rencana aksi BPS Kota Palembang untuk tahun yang akan datang yaitu :

1. Semakin meningkatkan kualitas publikasi akurasi yang diterbitkan
2. Publikasi yang diterbitkan juga harus semakin up to date
3. Semakin meningkatkan pelayanan di website agar memudahkan pengguna data dalam mencari publikasi di website BPS Kota Palembang

Gambar 4. Publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi



Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua terdiri dari 1 sasaran strategis yaitu Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan 2 indikator, yaitu:

1. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 12. Hasil Capaian Kinerja Tujuan Kedua BPS Kota Palembang Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi Kegiatan statistik	Persen	53	146	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menyampaikan metadata Sektoral sesuai standar	Persen	84	92	109,59
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua					114,79

Sesuai dengan UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik, instansi pemerintah yang akan melakukan kegiatan statistik diwajibkan melaporkan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan kepada BPS. Menurut PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2 menjelaskan bahwa penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

1. Memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS

3. Menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Setelah diteliti dan diproses oleh BPS akan dikeluarkan suatu rekomendasi yang menyatakan kegiatan yang bersangkutan layak atau tidak untuk dilanjutkan. BPS wajib meneliti dan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan survei sektoral, meliputi:


1. Tujuan Survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistic yang akan digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Rekomendasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral dan membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional. BPS Kota Palembang berkoordinasi dengan sekretaris daerah dalam rangka pengajuan rekomendasi statistik oleh Dinas/Instansi. Sebagai bentuk dukungan, Sekretaris Daerah mengeluarkan surat Nomor : 555/002095/kominfo/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral. Dalam surat ini Sekretaris Daerah menghimbau kepada seluruh OPD sebagai berikut:

1. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap pelaksanaan survei statistic sektoral yang hasilnya dipublikasikan.
2. Melaporkan dan meminta rekomendasi BPS setiap kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan survei statistic sektoral yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
4. Melaporkan hasil kegiatan kompilasi produk administrasi yang hasilnya dipublikasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

Kendala :

OPD yang telah diberikan pembinaan statistik kurang respon terhadap pengajuan



rekomendasi statistik. Selain itu, OPD terkadang masih tertutup terkait kegiatan yang dilakukan dan kurangnya kesadaran OPD untuk mengumpulkan data yang lebih terencana dengan mengacu pada rekomendasi statistik yang diberikan BPS. Beberapa OPD yang telah diberikan pembinaan statistik masih melanjutkan kegiatan statistik tahun sebelumnya sehingga tidak mengajukan rekomendasi statistik tahun ini.


Solusi :

Melaksanakan pembinaan statistik melalui acara FGD Palembang Dalam Angka yang dilaksanakan di Hotel Beston Palembang pada tanggal 22 Februari 2023 . Materi yang disampaikan yaitu FGD Publikasi Palembang Dalam Angka dan Pembinaan Statistik Sektoral , salah satunya berupa Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik).

Tindak Lanjut :


Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi statistik dari BPS Kota Palembang pada tahun 2023 yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, surat rekomendasi nomor 303/1671/VS.330/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan (SKMP)
2. Dinas Pendidikan Kota Palembang, surat rekomendasi nomor : 285/1671/VS.330/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan judul Perencanaan Layanan di Bidang Pendidikan Pendataan Warga Usia 7-15 Tahun yang Sekolah dan tidak Kota Palembang Tahun 2023
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, surat rekomendasi nomor : 290/1671/VS.330/09/2023 tanggal 16 September 2023 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palembang
4. Dinas Kebudayaan Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.517/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
5. Dinas Kesehatan Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor :



P.515/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

6. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.520/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
7. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.512/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.514/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. Dinas Perdagangan Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.516/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
10. Dinas Perhubungan Kota Palembang surat rekomendasi Nomor : P.509/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
11. Dinas Perikanan Kota Palembang surat rekomendasi Nomor : P.522/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang surat rekomendasi Nomor : P.523/1671/VS.330/07/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.509/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.521/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
15. Dinas Perindustrian Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.518/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei



Kepuasan Masyarakat (SKM)

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.509/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
17. Dinas Pariwisata Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.519/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
18. Dinas Sosial Kota Palembang ,surat rekomendasi Nomor : P.524/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
19. Dinas Pendidikan Kota Palembang, surat rekomendasi Nomor : P.515/1671/VS.330/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Strategi yang dapat dijalankan agar capaian indikator pertama tujuan kedua dapat meningkat pada tahun berikutnya yaitu :


1. Melakukan pembinaan statistik kepada OPD melalui FGD atau sosialisasi yang dilaksanakan BPS Kota Palembang
2. Melakukan pembinaan statistik ke instansi yang melakukan kegiatan statistik sektoral
3. Menawarkan kegiatan-kegiatan statistik sektoral ke setiap OPD untuk dibuatkan rekomendasi

Kegiatan statistik ini dapat diakses pada website <https://romantik.bps.go.id/site/pencarian/> website rekomendasi statistik (Romantik) online. Dari capaian tersebut realisasi dari persentase OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yaitu sebesar 146 persen dari target 53 persen dengan capaian kinerja sebesar 120 persen.

Gambar 5. Penyelenggaraan Rekomendasi Statistik Kota Palembang Tahun 2023

Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tgl. Pengajuan	Tgl. Perbaikan Terakhir	Tgl. Selesai	Proses Pemeriksaan	Rating	Status
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Perindustrian	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Kebudayaan	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Perdagangan	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Perikanan	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14 Desember 2023	11 Desember 2023	14 Desember 2023	3 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Pendidikan Kota Palembang	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Kesehatan	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Perhubungan Kota Palembang	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai

Judul Kegiatan	Penyelenggara	Tgl. Pengajuan	Tgl. Perbaikan Terakhir	Tgl. Selesai	Proses Pemeriksaan	Rating	Status
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palembang	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Pariwisata	14 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Sosial	08 Desember 2023	-	14 Desember 2023	5 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	11 Desember 2023	-	14 Desember 2023	2 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	13 Desember 2023	-	14 Desember 2023	0 hari	-	selesai
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18 September 2023	18 September 2023	18 September 2023	0 hari	-	selesai
PERENCANAAN LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN PENDATAAN WARGA USA 7-15 TAHUN YANG SEKOLAH DAN TIDAK BERSEKOLAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2023	Dinas Pendidikan Kota Palembang	24 Agustus 2023	-	13 September 2023	20 hari	-	selesai
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Palembang	Dinas Lingkungan Hidup	07 Juli 2023	-	10 Juli 2023	2 hari	-	selesai




Indikator Kedua sasaran strategis pertama dari tujuan kedua yaitu Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku. Target pengumpulan metadata statistik tahun 2023 dihitung dari dinas/instansi yang berkontribusi dalam penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2023.

Daftar OPD yang *support* data Daerah Dalam Angka, yaitu:

1. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang
3. Dinas Kesehatan Kota Palembang
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang
5. Dinas Pariwisata Kota Palembang
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
9. Dinas Perdagangan Kota Palembang
10. Dinas Perikanan Kota Palembang
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang
12. Dinas Sosial Kota Palembang
13. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Pada tahun 2023 , pengumpulan metadata masih dilaksanakan oleh BPS Kota Palembang, tetapi tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sedangkan BPS Kota Palembang hanya sebagai pemeriksa/ verifikasi serta menyetujui bahwa kegiatan metadata telah dilaksanakan. Kendala yang ditemukan oleh




BPS dalam pengumpulan metadata ini yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Palembang agar ketepatan dan keakuratan metadata statistik tetap terjamin dan berjalan lancar.

Koordinasi yang dilaksanakan dengan Dinas Kominfo Kota Palembang tersebut berhasil dan pada Triwulan IV 2023 terdapat 12 OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar yaitu dari :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan judul “Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang 2022
2. Dinas Pendidikan Kota Palembang dengan judul Pendataan Anak yang Tidak Bersekolah lagi Usia 7-15 tahun
3. Dinas Sosial Kota Palembang dengan judul Jumlah Penghuni Panti Asuhan Menurut Usia per Jenis Kelamin di Kota Palembang
4. Dinas Kebudayaan Kota Palembang dengan judul Jumlah Organisasi Kesenian dan Kebudayaan Kota Palembang
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dengan judul Surat Izin Usaha Perdagangan (Sirup) Izin Usaha Mikro (UMK) Perseorangan Kota Palembang
6. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dengan judul Banyaknya Sarana Olahraga per Kecamatan di Kota Palembang
7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan judul Jumlah Produksi Telur dan Daging di Kota Palembang
8. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dengan judul Jumlah Usaha Koperasi dan Anggota menurut Kecamatan di Wilayah Kota Palembang menurut Jenisnya
9. Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan judul Jumlah Tenaga Kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
10. Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan judul Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan menurut Jenis Kelamin di Kota Palembang
11. Dinas Perhubungan Kota Palembang dengan judul Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Kota Palembang
12. Dinas Perdagangan Kota Palembang dengan judul Jumlah Pasar Menurut Jenisnya di Kecamatan di Kota Palembang

Dari target sebesar 11 OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai



standar , BPS Kota Palembang berhasil mencapai 12 OPD sehingga capaian kinerja indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar yaitu mencapai 109,59 persen dengan realisasi 92,31 persen. Pencapaian tersebut menghantarkan BPS Kota Palembang mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 persen.

Selanjutnya pada bulan Agustus 2023 telah dilakukan Workshop Satu Data Palembang , dengan materi yang disampaikan Satu Data Indonesia dan Metadata. BPS dan Bappeda bertindak sebagai pendampingan dalam kegiatan dimaksud. Pendampingan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 15, 16 dan 21 Agustus 2023.

Strategi yang dapat dilakukan agar capaian indikator kedua tujuan kedua dapat meningkat pada tahun berikutnya yaitu :

1. Tetap melakukan workshop Satu Data Palembang dengan jumlah OPD yang lebih banyak.
2. Tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Palembang pada awal tahun, sehingga jumlah OPD yang menyampaikan metadata sektoral lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Melanjutkan pendampingan dalam pelaksanaan dan penyusunan metadata sektoral
4. Membuka konsultasi metadata statistik bagi dinas yang membutuhkan.
5. Menambah SDM dalam penyelenggaraan statistik sektoral
6. Memfasilitasi para pembina data dengan laptop

Gambar 6. Daftar Pelaporan Metadata Statistik Kota Palembang Tahun 2023

The image displays two screenshots of a web application interface for statistical metadata reporting. The interface includes a search bar, filters for Province (SUMATERA SELATAN) and City (KOTA PALEMBANG), and a table of reports. The table columns are: No., Nama Kegiatan, Tahun, Jenis Statistik, Proban Data, Tanggal Diujikan, Pelapor, Pemeriksa, Status, and Aksi.

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Jenis Statistik	Proban Data	Tanggal Diujikan	Pelapor	Pemeriksa	Status	Aksi
11	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Perhubungan Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
12	Jumlah Pasar Menurut Jenisnya Di Kecamatan Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Perdagangan Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
1	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang 2022	2022	Statistik Sektor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang	13 Juli 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
2	Pendidikan Anak Yang Tidak Bersekolah Lagi Usia 7-15 Tahun/MIK Yang Tidak Bersekolah LAO USIA 7-15 TAHUN	2023	Statistik Sektor	Dinas Pendidikan Kota Palembang	06 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
3	Jumlah Penghun Perumahan Menurut Usia Per Jenis Kelamin Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Sosial Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
4	Jumlah Organisasi Keaseman Dan Ketubuhan Kota Palembang	2022	Statistik Sektor	Dinas Ketubuhan Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
5	Buat dan Update Pedagogis (Budi dan Usaha Mikro, Kecil) Penanganan Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Perencanaan, Monev dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
6	Bersihnya Sarana Dan Prasarana Per Kecamatan Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
7	Jumlah Produksi Tenun Dan Daging Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Perencanaan dan Kerjasama Pangan	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
8	Jumlah Usaha Kesehatan Dan Anggita Menurut Kecamatan Di Wilayah Kota Palembang Menurut Jenisnya	2023	Statistik Sektor	Dinas Kesehatan dan UKM Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
9	Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Uji Rumah Sakti Umum Daerah Sekeloa Di	2023	Statistik Sektor	Dinas Kesehatan Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	
10	Jumlah Peningkat Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Di Kota Palembang	2023	Statistik Sektor	Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang	13 Desember 2023	Fetri Nilawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Budi Supriadi S.Kom.	Selesai	

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan Ketiga terdiri dari satu sasaran strategis “Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I” dengan satu indikator yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik. Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada




tabel dibawah ini:

Tabel 13. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kota Palembang Tahun 2023					
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
3.Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	96	170,96	120
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ketiga					120

Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui Kerjasama daerah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistic sektoral, Pemerintah Daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral, BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan statistic sektoral yang dilakukan secara berkala. Kendala yang ditemui BPS Kota Palembang yaitu masih banyak OPD atau lembaga yang tidak melaporkan kegiatan statistiknya. Hal ini salah satunya juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari BPS ke K/L/D/I terkait pelaksanaan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK dan Kegiatan statistik di K/L/D/I kadang belum menjadi prioritas utama.

Penanggung jawab dalam merealisasikan target dari indikator ini adalah fungsi statistik sosial, statistik produksi, statistik distribusi, IPDS dan Neraca wilayah dan analisis. Sesuai tabel diatas capaian kinerja indikator kinerja ini yaitu sebesar 120 persen, dengan realisasi 170,96 persen dari target 96 persen. Terdapat peningkatan yang besar terhadap indikator ini.


Pembinaan statistik dilaksanakan dalam bentuk FGD Publikasi Palembang Dalam Angka pada tanggal 22 Februari 2023 di Hotel Beston Palembang. Materi yang dibahas dalam FGD tersebut yaitu Pembahasan Data Daerah Dalam Angka Kota Palembang, Metadata, Pembinaan Rekomendasi Statistik serta sosialisasi EPSS Tahun 2023. Ada 53 OPD yang mendapatkan pembinaan statistik yaitu :

- 
1. DPRD Kota Palembang
 2. Kejaksaan Negeri
 3. Pengadilan Negeri
 4. Sekda Kota Palembang
 5. Dandim 0418 Palembang
 6. Danlanal Palembang
 7. Danlaud Sri Mulyono Herlambang
 8. Inspektorat Daerah Kota Palembang
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
 11. Kementerian Agama Kota Palembang
 12. Kementerian Hukum dan HAM Kota Palembang
 13. Kantor Pertanahan Kota Palembang
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
 15. BPKAD Kota Palembang
 16. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
 17. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang
 18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palembang
 19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
 20. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang
 21. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang
 22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Palembang
 23. Dinas Kesehatan Kota Palembang
 24. Dinas Perhubungan Kota Palembang
 25. Dinas Ketahanan dan Pertanian Pangan Kota Palembang
 26. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
 27. Dinas Pendidikan Kota Palembang
 28. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
 29. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
 30. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Palembang
 31. Dinas Kebudayaan Kota Palembang
 32. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang
 33. Dinas Perdagangan Kota Palembang
 34. Dinas Kehutanan Kota Palembang

- 
35. Dinas Perikanan Kota Palembang
 36. Camat Ilir Barat I
 37. Camat ilir Barat II
 38. Camat Seberang Ulu I
 39. Camat seberang Ulu II
 40. Camat Ilir Timur I
 41. Camat Ilir Timur II
 42. Camat Ilir Timur III
 43. Camat Sukarami
 44. Camat Sako
 45. Camat Kemuning
 46. Camat Kalidoni
 47. Camat Bukit Kecil
 48. Camat Gandus
 49. Camat Kertapati
 50. Camat Plaju
 51. Camat Alang-alang Lebar
 52. Camat Sematang Borang
 53. Camat Jakabaring

Pada bulan Agustus 2023, berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS Kota Palembang memberikan pembinaan statistik kepada OPD sebanyak 3 kali pertemuan yaitu :

- 15 Agustus 2023 , adapun K/L/D/I yang mendapat pembinaan statistik yaitu :
 1. RSUD Palembang BARI
 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
 3. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
 4. BKPSDM
 5. Bappeda Litbang
 6. Dinas Perindustrian
 7. Dinas Perdagangan
 8. Sekretaris Daerah
- 16 Agustus 2023, adapun K/L/D/I yang mendapatkan pembinaan yaitu :
 1. Dinas Perikanan

- 
2. Dinas Pariwisata
 3. Dinas Kebudayaan
 4. Dinas Perhubungan
 5. Bappeda Litbang
 6. DMPTSP
 7. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

➤ 21 Agustus 2023, Adapun OPD yang mendapatkan pembinaan yaitu :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
2. Sekretaris Daerah
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palembang
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pendidikan
10. Sekretariat DPRD
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang
12. Bappeda Litbang

Selain itu pembinaan statistik juga dilaksanakan ketika menghadiri undangan sebagai narasumber dari organisasi perangkat daerah. Dan pada tahun 2023 BPS Kota Palembang telah memenuhi undangan dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan dalam rangka Pembahasan Analisis Determinan Inflasi Kota Palembang, Koordinasi terkait Entry Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka Validasi Data Tanaman Pangan Tahun 2023 dan kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan dalam rangka Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terkait Entry Aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistic yang unggul dan berdaya saing dalam rangka tata Kelola kelembagaan. Untuk mengukur sasaran strategis SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Tata Kelola Kelembagaan, BPS Kota Palembang menetapkan dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS


Capaian Kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 14. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kota Palembang Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4. Penguatan tata Kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian implementasi SAKIP	Persen	71	74,75	105,28
	Persentase kepuasan Pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS	Persen	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat					102,64

Hasil Penilaian Implementasi SAKIP

Indikator pertama dari sasaran strategis keempat tujuan keempat yaitu point Hasil Penilaian implementasi SAKIP. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu 71 poin, dan hasil penilaian dari Inspektorat yaitu 74,75 poin atau capaian kinerja pada tahun



2023 sebesar 105,28 persen, sebagaimana surat inspektur Wilayah I Nomor : B-0750/08100/PW.110/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2023 BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kota Palembang diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses akuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan focus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kota Palembang dilakukan dengan mengundang seluruh Tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di BPS Kota Palembang. Dokumen yang dihasilkan beruparencana aksi/perjanjian kinerja yang memuat target, output dan outcome yang dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan. Pemantauan yang dilakukan berupa rapat yang dihadiri oleh seluruh pegawai BPS Kota Palembang. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam memonitoring kegiatan di BPS Kota Palembang, setiap minggu diadakan rapat evaluasi kinerja mingguan yang dipimpin oleh Kepala BPS Kota Palembang atau Kasubbag. Umum atau Ketua Tim apabila Kepala BPS Kota Palembang tidak dapat menghadiri. Melalui rapat tersebut setiap kegiatan dipantau dan dilakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dan dicari solusi serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi sehingga permasalahan dapat diatasi sebaik mungkin.

Kendala:

1. Pendokumentasian kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja masih kurang.
2. Padatnya kegiatan sehingga Tim Sakip yang dibentuk belum dapat bekerja

optimal sehingga pemenuhan pendukung Sakip hanya bertumpu pada beberapa orang saja

Solusi dan Bentuk Tindak Lanjut :

1. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja yang tepat waktu
2. Secara bertahap mulai menyusun pendukung Sakip pada link : http://s.bps.go.id/FRA_Bukti_Dukung_2023

Persentase Kepuasan Pengguna data Terhadap pemenuhan Sarana dan prasarana Pelayanan BPS

Indikator sasaran strategis tujuan keempat yaitu persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

P = Persentase kepuasan pengguna data terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan BPS

x=Jumlah konsumen data yang merasa puas dengan sarana dan prasarana BPS

y =Jumlah seluruh konsumen

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen dalam pelayanan. BPS Kota Palembang telah memiliki Gedung untuk ruangan Pelayanan Statistik Terpadu. Ruang Pelayanan Statistik Terpadu baru berasal dari pemeliharaan dan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Ruang tersebut masih perlu penambahan peralatan dan perlengkapan dikarenakan masih baru selesai pengadaan dan masih perlu tambahan anggaran untuk menyelesaikan sarana dan prasarannya.

Perubahan signifikan dalam ruangan PST tersebut yaitu telah disediakan komputer yang berisi :

1. Buku Tamu
2. Resepsionis
3. Pelayanan Mandiri
4. Pelayanan Cetak



Hal ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pengunjung untuk mencari data yang mereka butuhkan. Selain itu BPS Kota Palembang juga melayani konsultasi statistik. Untuk layanan konsultasi statistik BPS Kota Palembang telah memberikan jadwal kepada petugas untuk melayani konsultasi. Apabila petugas berhalangan maka seluruh pegawai BPS Kota Palembang yang mengerti dan memahami dapat melayani konsultasi statistik.

Gambar 7 Ruang Pelayan Statistik Terpadu



Secara non fisik peningkatan persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pojok statistik. Kegiatan pojok statistik dilaksanakan di Universitas Bina Dharma Palembang dengan MOU Nomor : 121/Moumniv-BDN111/202tanggal 22 Agustus 2023.

Gambar 8 Penandatanganan MOU Pojok Statistik di Universitas Bina Dharma Palembang



Dalam mewujudkan Pojok Statistik ini BPS Kota Palembang masih terhambat dengan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana, sehingga BPS Kota Palembang melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Bina Dharma dalam hal pengadaan inventaris dan sarana prasarana seperti Personal Computer, Meja , Kursi, wifi dan ruangan pojok statistik. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pojok Statistik tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 9. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pojok Statistik



Anggota Pojok statistik bertugas melayani konsultasi statistik terhadap pengunjung, melakukan kegiatan promosi kegiatan statistik yang sedang berlangsung, memberikan *Knowledge sharing/capacity building* yang akan dilakukan ke mahasiswa /civitas campus. Anggota pojok statistik bertugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Diharapkan melalui pojok statistik ini dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan lebih jauh meningkatkan kepuasan konsumen data terhadap data BPS.

Kendala :

Kendala yang ditemui adalah tidak seluruh pengguna data dapat melakukan akses secara fisik ke PST BPS Kota Palembang, sehingga BPS Kota Palembang perlu mengembangkan sarana dan prasarana non-fisik lainnya.

Solusi dan bentuk tindak lanjut :

Semua komponen sarana dan prasarana tersebut dapat dipenuhi oleh PST di BPS Kota Palembang, yang mengindikasikan terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik dalam

pelayanan. Selain tersedianya sarana prasarana tersebut PST BPS Kota Palembang melakukan adaptasi dengan kondisi baru, dengan melakukan pengembangan untuk pelayanan yang dilakukan secara online. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi serta sarana pendukung, pelayanan tanpa tatap muka langsung terus dikembangkan di PST. Dan pada bulan Agustus BPS Kota Palembang melakukan kerjasama dengan Universitas Bina Dharma dan di bulan Desember 2023 pojok statistik di buka di Universitas Bina Dharma. Diharapkan melalui pojok statistik ini dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan dan lebih jauh meningkatkan kepuasan konsumen terhadap data BPS.

Upaya-upaya yang telah dilakukan di atas membawa BPS Kota Palembang dapat mempertahankan capaian kinerja indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS sebesar 100 persen. Tahun 2024 BPS Kota Palembang mengembangkan strategi meningkatkan dan memperluas pelayanan konsultasi dengan cara office to office. Selain itu penambahan sarana dan prasarana ruang pelayanan PST perlu ditingkatkan demi kenyamanan pengguna.



3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023

Perkembangan capaian kinerja BPS Kota Palembang dari tahun 2020 s.d 2023 cukup fluktuatif. Pada awal tahun Renstra 2020-2024 capaian kinerja BPS Kota Palembang hanya mencapai 102,88 persen dan merupakan capaian kinerja terendah selama 4 tahun. Pada awal tahun Renstra masih banyak terdapat hambatan dan kendala yang ditemui. Masih banyak OPD yang belum mengerti dan kurang paham tentang kegiatan statistik. Banyak diantara OPD yang melakukan kegiatan statistik namun tidak meminta rekomendasi melalui romantik ke BPS. Dengan seiring berjalan waktu, BPS Kota Palembang semakin giat melakukan pembinaan dan sosialisasi ke masing-masing OPD sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang statistik sektoral. Lebih lanjut Organisasi Perangkat Daerah mulai mengajukan rekomendasi ke BPS Kota Palembang.

Pada tahun 2021 capaian kinerja mulai menunjukkan peningkatan menjadi 105,35 persen , meningkat 2,47 persen dari tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja dari 105,35 persen menjadi 104,04 persen, menurun 1,31 persen dibanding tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh belum tercapainya target Hasil penilaian implementasi SAKIP. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian kinerja yang signifikan dan merupakan capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 107,84 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan 3,8 persen.


Gambar 11. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2023



Tabel 15. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2020 s.d 2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	110	110	100	100
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	110	110	100	100
1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	120	120	100	100
1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi , inetgrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	100	100	110	114,79
2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	100	100	110	114,79
2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	100	100	120	120
2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	100	100	100	109,59
Tujuan 3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	100	100	108,33	120
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	100	100	108,33	120
3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	100	100	108,33	120
Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	101,94	108,74	99,97	102,64
4.1. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	101,94	108,74	99,97	102,64
4.1.1. Hasil penilaian implementasi SAKIP	101	99,83	99,94	105,28
4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	102,88	117,65	100	100
Total	102,88	105,35	104,04	107,84

Perbandingan capaian kinerja per indikator juga dapat diperhatikan bahwa pada tahun 2023 terdapat 4 indikator yang melebihi dari target yang ditetapkan dan yang lainnya 100 persen, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 1 indikator yang



belum mencapai target yang ditetapkan yaitu hasil penilaian implementasi SAKIP. Kedepan BPS Kota Palembang harus lebih giat lagi meningkatkan performa dan kinerjanya dalam mencapai tujuan.

Penyebab keberhasilan dalam mencapai predikat kinerja yang tinggi pada tahun 2023 yaitu :

1. Penganggaran berbasis kinerja telah diimplementasikan di BPS Kota Palembang. Bahwa setiap anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan sesuatu. Seperti rapat yang telah dilaksanakan dalam rangka pendampingan satu data berhasil meningkatkan jumlah OPD yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dan jumlah OPD yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Pelaksanaan FGD Palembang Dalam Angka bukan hanya berisi materi tentang Palembang Dalam Angka tetapi juga berisi materi tentang Romantik (rekomendasi statistik) dan metadata sektoral.
2. Setiap kegiatan telah dievaluasi setiap minggu melalui rapat rutin mingguan dan telah dicari solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang ditemui.
3. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada tujuan yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
4. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Periode Renstra 2020-2024

3.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Renstra 2020 s.d 2023

Berdasarkan peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 bahwa Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan reviu Renstra 2020-2024. Selama 5 tahun realisasi Renstra tersebut dilakukan pemantauan dan di evaluasi secara berkala sehingga dapat diketahui perkembangan kinerjanya. Realisasi Renstra dapat dilihat pada table 16.


Tabel 16. Realisasi Kinerja Renstra 2020-2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100	100
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	3,85*	4*	100	100
2.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	33,33*	100*	50	146
2.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	10*	69,23	76	92,31
3.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	2,5*	2,5*	100	170,97
4.1. Hasil penilaian implementasi SAKIP	69,69	69,88	69,96	74,75
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	81,67	100	100	100

* Target Tahun 2022 s.d 2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator dan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022

Berdasarkan tabel tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan tahun 2023. Peningkatan tertinggi pada indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik terdapat peningkatan 192 persen dari target yang ditetapkan 50 persen.

Indikator Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan selama 4 tahun tidak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa BPS Kota Palembang mampu menyediakan data untuk pembangunan. Kendala yang ditemui yaitu masih terdapat permintaan data yang datanya tidak tersedia di BPS, seperti permintaan data dari pemerintah daerah dimana data tersebut hanya tersedia sampai level provinsi. Upaya yang telah dilakukan seperti memenuhi seluruh permintaan data dari pihak eksternal dengan melibatkan seluruh pegawai, pemenuhan undangan dari OPD sebagai narasumber data evaluasi



pembangunan, , membuka pojok statistik di Universitas Bina Dharma Palembang, meningkatkan pelayanan di PST BPS Kota Palembang seperti penyediaan komputer PST, memberikan kemudahan kepada setiap pengguna untuk melakukan konsultasi statistik dan upaya-upaya lainnya.

Indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi untuk tahun 2020 s.d 2021 tidak dapat diperbandingkan , sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 BPS Kota Palembang masih dapat mempertahankan kinerjanya, dengan realisasi kinerja 100 persen. Penyusunan publikasi yang uptodate seringkali menjadi tantangan bagi penyusunnya , dikarenakan data yang tersedia baru dapat selesai di akhir tahun sehingga penyusun harus semaksimal mungkin menggunakan waktu yang tersedia sehingga publikasi dapat terbit sesuai jadwal rillis. Untuk tujuan tersebut BPS Kota Palembang telah menyediakan Senarai Rencana Terbit Publikasi BPS di website BPS Kota Palembang yang dapat diakses pada link <https://palembangkota.bps.go.id/publication.html> selain itu penyediaan publikasi yang memenuhi standar akurasi semakin di perbanyak

Indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel diatas realisasi tidak dapat diperbandingkan. Namun secara real terdapat peningkatan jumlah rekomendasi statiatik. Pada tahun 2020 BPS Kota Palembang mendapatkan 1 OPD yang mengajukan rekomendasi statistik dan meningkat di tahun 2021 dan 2022 sebanyak 3 OPD dan 6 OPD. Dan pada tahun 2023 meningkat kembali dari target 7 OPD menjadi 19 OPD yang mengajukan rekomendasi ke BPS Kota Palembang. Realisasi indikator 2.1 menjadi 146 persen, dari target 50 persen. Dalam rangka peningkatan rekomendasi statistik BPS berupaya meningkatkan koordinasi dan hubungan baik dengan semua OPD agar memudahkan dalam melakukan sosialisasi ataupun pembinaan statistik. Salah satunya adalah dengan membuat whatsapp grup (WAG) untuk mempermudah berkomunikasi dan menyampaikan informasi- informasi khususnya informasi terkait kegiatan statistik sehingga OPD tertarik untuk menyampaikan rekomendasi statistik ke BPS Kota Palembang.

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Tahun 2020 terkumpul 4 metadata sektoral, Tahun 2021 terkumpul 12 metadata sektoral dari 9 OPD dengan realisasi 69,23 persen. Tahun 2022 terkumpul 13 metadata sektoral dari 10 OPD dengan realisasi 76 persen , sedangkan untuk tahun 2023 juga terdapat peningkatan dengan 12 metadata sektoral dari 12 OPD sehingga realisasi menjadi 92,31 persen.



Upaya yang dilakukan oleh BPS Kota Palembang yaitu akan terus berkoordinasi dengan walidata dalam hal ini adalah Kominfo untuk sharing knowledge penguasaan materi tata kelola dan pemanfaatan aplikasi Indonesia Data Hub (INDAH) dan semakin intens dalam mengkomunikasikan perihal dokumen metadata ke OPD terkait agar data selesai tepat waktu.

Indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik. Tahun 2020 dan 2021 tidak dapat diperbandingkan karena mengalami perubahan nomenklatur mengikuti Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022. Tahun 2022 terdapat pembinaan statistik terhadap 13 OPD, pembinaan dilakukan secara *office to office* sedangkan pada tahun 2023 pembinaan statistik dilakukan bersamaan dengan FGD Palembang Dalam Angka. Dengan jumlah OPD yang menghadiri sebanyak 53 OPD, sehingga realisasi menjadi 170,97 persen dengan target 96 persen. Kendala yang ditemui yaitu masih kurangnya pemahaman dinas mengenai kegiatan pengumpulan data yang sesuai kaidah statistik sehingga beberapa data dinas masih tidak konsisten dan belum lengkap sehingga perlu dilakukan pembinaan statistik.

Indikator Kinerja Hasil penilaian implementasi SAKIP, setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 69,69 poin hingga tahun 2023 meningkat menjadi 74,75 poin. Peningkatan tersebut merupakan usaha yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran BPS Kota Palembang dalam memenuhi target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kota Palembang yaitu memenuhi dan terus melengkapi semua Permindo SAKIP yang dibutuhkan.

Indikator kinerja Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS mengalami peningkatan dari tahun 2020 menjadi 100 persen di tahun 2021 s.d 2023. Diharapkan peningkatan ini akan terus berlanjut ke tahun berikutnya. Pada Tahun 2023 telah diadakan penataan kembali ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Palembang agar semakin menambah kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung dalam mendapatkan data yang dibutuhkan selain itu PST Digital dan website juga semakin ditingkatkan performanya dalam memberikan kemudahan pengguna data yang mencari data secara online

3.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Renstra 2023

Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, dikarenakan target Renstra lebih rendah dari Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 17. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama		Target Renstra 2023	Realisasi Renstra 2023	Capaian Kinerja Rentsra 2023
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100
1.2.	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100
2.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	50	146	120
2.2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	76	92,31	120
3.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	92	170,97	120
4.1.	Hasil penilaian implementasi SAKIP	70	74,75	106,78
4.2.	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan				110,85

Capaian Kinerja tertinggi di capai oleh indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik, dengan

realisasi 146 persen, BPS Kota Palembang mampu memperoleh capaian kinerja 292 persen atau di bulatkan 120 persen. Dikuti oleh indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik, dengan realisasi 170,97 persen dapat memperoleh capaian kinerja 185 persen atau dibulatkan 120 persen. Sedangkan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dengan realisasi 92,31 persen, dapat memperoleh capaian kinerja 121 persen .

Indikator Hasil penilaian implementasi SAKIP juga dapat melebihi dari target 70 poin, BPS Kota Palembang dapat memperoleh realisasi 74,75 dengan capaian kinerja 106,78 persen. Dan indikator lainnya masih dapat mempertahankan realisasi kinerjanya dengan realisasi sebesar 100 persen dengan capaian 100 persen.

3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 terhadap Target Renstra 2024

Tahun 2023 dan 2024 BPS Kota Palembang menetapkan target Renstra yang sama besarnya hanya indikator kinerja Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada tahun 2024 meningkat menjadi 71 poin. Seluruh capaian kinerja terhadap target akhir Renstra dapat dicapai oleh BPS Kota Palembang, bahkan terdapat 3 indikator kinerja yang melebihi dari 120 persen, yaitu indikator IKU 2.1. IKU 2.2 dan IKU 3.1. Bahkan indikator kinerja hasil penilaian implementasi SAKIP yang targetnya lebih tinggi dari Tahun 2023 dapat dicapai, yaitu dengan capaian kinerja 105,28 persen. Tabel 10 berisi target,realisasi dan capaian kinerja terhadap target akhir Renstra 2020-2024.

Tabel 18. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tujuan Renstra 2023 Terhadap target Renstra 2024


Indikator Kinerja Utama		Target Renstra 2024	Realisasi Renstra 2023	Capaian Kinerja Rentsra 2023
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	100	100	100

1.2.	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100
2.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	50	146	120
2.2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	76	92,31	120
3.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	92	170,97	120
4.1.	Hasil penilaian implementasi SAKIP	71	74,75	105,28
4.2.	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan				110,66

Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023 terhadap target Renstra 2023 dan 2024 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Terhadap target Renstra 2023 BPS Kota Palembang berhasil memperoleh capaian kinerja 110,85 sedangkan tahun 2024 memperoleh 110,66 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa BPS Kota Palembang telah berhasil mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan.

3.4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja


Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan. Dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi pemerintah tersebut, dirancang sebuah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Namun kegiatan dominan yang dapat menunjang pencapaian kinerja yaitu :

- Laporan Diseminasi dan metadata statistik, melalui anggaran ini BPS Kota Palembang dapat melaksanakan FGD Palembang Dalam Angka sehingga capaian kinerja IKU 2.1 dapat mencapai 19 OPD, publikasi Palembang Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka dapat terbit.
- Laporan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional, melalui anggaran ini BPS Kota Palembang dapat melaksanakan rapat pembinaan statistik sektoral dan pendampingan satu data Palembang.
- Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik , sehingga publikasi statistik daerah 2023 dan Indikator kesejahteraan rakyat Kota Palembang Tahun 2023 dapat terbit di website BPS Kota Palembang.
- Publikasi/laporan Neraca Produksi, melalui anggaran ini BPS Kota Palembang dapat menyusun Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha 2018-2022 dan pengumpulan data neraca produksi dapat dihimpun sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penyusunan publikasi PDRB tahun berikutnya.
- Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran, melalui anggaran ini BPS Kota Palembang dapat menyusun publikasi PDRB menurut Pengeluaran 2018-



2022 dan pengumpulan data neraca pengeluaran dapat dihimpun sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penyusunan publikasi PDRB tahun berikutnya.

- Publikasi/laporan Susenas, melalui anggaran ini kegiatan pelatihan, pengumpulan data, pemeriksaan dan pengolahan data serta penyusunan publikasi Statistik Kesejahteraan Kota Palembang pada bulan Desember 2023 dapat selesai tepat waktu dengan data uptodate.
- Layanan sarana internal, layanan perkantoran dan Perangkat Pengolah data dan komunikasi melalui anggaran ini dapat diadakan pengadaan meja, kursi, sofa, pekerjaan signage, pemeliharaan gedung kantor, rak buku PST, pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, pengadaan personal computer, scanner dan UPS. Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran tersebut dapat meningkatkan kepuasan pengguna data terhadap kelengkapan dan kenyamanan pelayanan yang diberikan.
- Layanan umum, melalui anggaran ini BPS Kota Palembang dapat menyelenggarakan pojok statistik. Melalui pojok statistik juga dapat menambah kepuasan pengguna data dalam memperoleh data dari BPS Kota Palembang tanpa harus datang ke PST BPS Kota Palembang. Dan melalui pojok statistik juga dapat dilakukan konsultasi statistik dan pengguna dapat memperoleh penjelasan dari pegawai yang menjaga pojok statistik tentang data apa yang tersedia di BPS Kota Palembang sehingga lebih mempermudah pengguna data mencari data yang dibutuhkan.
- Publikasi/laporan Sensus Pertanian, melalui anggaran ini pelaksanaan Sensus Pertanian dapat terlaksana dari pelatihan, pengumpulan data, pengolahan data dan pada bulan Desember 2023 BPS Kota Palembang dapat menyelesaikan 2 publikasi yaitu Hasil Pencacahan Lengkap Sensus

Pertanian 2023, Tahap 1 Kota Palembang dan Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, Tahap 1 Kota Palembang.

Selain itu kegiatan lain juga dapat mendukung pencapaian kinerja seperti kegiatan statistik distribusi, statistik industri , pertambangan dan penggalian, energi dan konstruksi, sakernas, statistik keuangan, teknologi informasi dan pariwisata dan lain- lainnya dapat digunakan bagi penyusunan publikasi lainnya seperti PDRB menurut Lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran.

Telah di implementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu. Apabila data tersebut tidak digunakan di BPS Kota Palembang akan berguna bagi BPS provinsi atau BPS Pusat untuk menyusun publikasi lainnya.

3.5. Prestasi dan Inovasi BPS Kota Palembang Tahun 2023

Dalam rangka peringatan Hari Statistik Nasional BPS Provinsi Sumatera Selatan memberikan anugerah penghargaan Lomba HSN kepada setiap Kabupaten/kota yang berprestasi. BPS Kota Palembang berhasil memperoleh penghargaan :

1. Sertifikat Kinerja Anggaran Terbaik 1 di Lingkungan Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan



2. Sertifikat Pengguna Aplikasi BOS Terbaik 3 di Lingkungan BPS Propinsi Sumatera Selatan



3. Juara I dalam rangka Lomba Menulis Opini Dalam Rangka Memperingati Hari Statistik Nasional Tahun 2023 di Lingkungan BPS Propinsi Sumatera Selatan



- 4 Piagam penghargaan dari Badan Pusat Statistik atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan SPT Tahun 2022 di Lingkungan Badan Pusat Statistik



Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan Rapat Zona Integritas dalam agenda pembuatan inovasi di BPS Kota Palembang. Inovasi yang telah dibangun, yaitu:

1. Inovasi WhatsApp Bot : Pelayanan Statistik Via Whatsapp yaitu permintaan data, konsultasi statistik, Info Statistik Terkini, dan *Whistle Blower*.
2. Link : <https://sites.google.com/view/satu-bspkotapalembang/berisi> semua data di BPS Kota Palembang yang berisi RKAKL/POK, LKKA-CS, Matriks DL, Matriks Beban Kerja, Dokumentasi Kegiatan, Nota Dinas, Link Aplikasi Monev Bappenas, Monev Smart, si Monev BPS, Form Rencana Aksi dan Musi.
3. Sistem Monitoring Mitra BPS Kota Palembang dengan Alamat link : <http://s.bps.go.id/penilaianmitra1671>.
4. Manajemen Sertifikat Pegawai yang bertujuan Untuk mendokumentasikan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM di BPS Kota Palembang agar dapat tertib dan terdokumentasi dengan baik. Manajemen Sertifikat Pegawai ini dapat diakses melalui <http://s.bps.go.id/manajemensertifikatpegawai>.

3.6. Kegiatan Prioritas BPS Kota Palembang Tahun 2023

3.6.1. Sensus Pertanian

Data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh dikumpulkan melalui kegiatan Sensus Pertanian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, penyelenggaraan Sensus Pertanian menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3.

Sensus Pertanian tahun 2023 (ST2023) merupakan Sensus Pertanian yang ke-7. kegiatan ST2023 dilakukan untuk mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program Food and Agricultural Organization (FAO) yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture (WCA).

ST2023 merupakan kegiatan besar yang terdiri dari rangkaian tahapan kegiatan yang diawali dengan perencanaan, persiapan, pengumpulan data, penyajian dan analisis data. Kegiatan ST2023 sudah dimulai sejak tahun 2021 dan direncanakan seluruh kegiatan akan berakhir tahun 2024.


Salah satu tahapan penting dalam ST2023 adalah pengumpulan data yang dilakukan pada bulan Juni-Juli 2023. Kegiatan pengumpulan data ini melibatkan banyak petugas baik dari organik BPS maupun Mitra.

Sesuai rekomendasi FAO dalam publikasi “World Programme for the Census of Agriculture 2020”, maka tujuan dari Sensus Pertanian Tahun 2023 adalah:

1. Menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil;
2. Menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini;
3. Menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Beberapa *output* dari hasil ST2023 yaitu:

1. Tersedianya sistem pengumpulan data pertanian yang terintegrasi dan

- 
- berkelanjutan dengan Sensus Pertanian sebagai aransemen utama dan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) sebagai data pelengkap tahunan diantara dua sensus;
2. Tersedianya data Statistik Pertanian baik dalam bentuk tabel dan spasial;
 3. Tersedianya data pertanian yang komprehensif dan memenuhi data-data kewilayahan;
 4. Terpenuhinya data pertanian untuk agenda global misalnya Indikator SDGs di sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN;
 5. Pemanfaatan *cost effective data collection tools and methodology* yang direkomendasikan FAO seperti penggunaan *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* dan *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)*;

Pelaksanaan pencacahan dalam ST2023 menerapkan dua metode pengumpulan data, yaitu metode *door to door* dan metode *snowball*. Metode *door to door* merupakan cara pengumpulan data dengan mengunjungi setiap unit observasi dalam setiap area sampel enumerasi. Sementara itu, metode *snowball* adalah cara pengumpulan data dengan mengunjungi hanya unit observasi yang diidentifikasi sebagai unit observasi yang memenuhi syarat.

Dalam pencacahan lengkap pada unit usaha pertanian perorangan (UTP), cakupan Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melibatkan SLS yang memiliki muatan KK/ KK tani dan sudah diklasifikasikan ke dalam wilayah konsentrasi dan non-konsentrasi pertanian. Pencacahan UTP di wilayah SLS konsentrasi pertanian dilakukan dengan metode *door to door*, sedangkan di wilayah SLS non-konsentrasi, pencacahan UTP dilakukan dengan metode *snowball*.

Pendekatan pengumpulan data untuk Usaha Pertanian Perorangan (UTP) disesuaikan dengan ketersediaan jaringan internet di setiap Kecamatan di tiap provinsi. BPS Kota Palembang dengan menggunakan moda CAPI.

Kegiatan ST2023 meliputi tujuh subsector pertanian, yaitu:

1. Subsector tanaman pangan,
2. Subsector tanaman hortikultura,
3. Subsector tanaman perkebunan,
4. Subsector peternakan,

5. Subsektor perikanan,
6. Subsektor kehutanan, dan
7. Subsektor jasa pertanian.

Sedangkan kegiatan pertanian yang dicakup meliputi:

1. Budi daya tanaman, yaitu: padi, palawija, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, kehutanan (antara lain:kayu, getah, rotan, dll).
2. Budi daya Ternak/Unggas.
3. Budi daya ikan dan penangkapan ikan.
4. Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, Perburuan dan penangkapan satwa liar,dan pemungutan hasil hutan.
5. Jasa pertanian.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian di wilayah Kota Palembang, BPS Kota Palembang mendapatkan data jumlah rumah tangga usaha pertanian, Perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya menurut Kecamatan di Kota Palembang. Seperti pada table dibawah ini :

Tabel 19 Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum dan Usaha Pertanian Lainnya di Kota Palembang

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Rumah Tangga UsahaPertanian <i>Agricultural Households</i> (rumah tangga/households)	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum <i>Agricultural Corporation</i> (unit/units)	Usaha Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Holding</i> (unit/units)
(1)	(2)	(3)	(4)
Ilir Barat Dua	111	–	–
Gandus	1.604	1	2
Seberang Ulu Satu	160	–	–
Kertapati	1.656	–	–
Jakabaring	223	–	–
Seberang Ulu Dua	188	–	–
Plaju	657	–	–
Ilir Barat Satu	1.029	–	–
Bukitkecil	55	–	–
Ilir Timur Satu	65	1	–
Kemuning	356	–	–
Ilir Timur Dua	348	1	–
Kalidoni	1.222	–	–
Ilir Timur Tiga	61	3	–
Sako	439	–	–


Sematangborang	392	–	–
Sukarami	1.041	7	–
Alang-Alang Lebar	392	–	–
Palembang	9.999	13	2

3.6.2. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan 2022 untuk menghadapi dampak yang muncul dari serangan wabah pandemi Covid-19, maka dicetuskan tiga reformasi struktural yaitu reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh penduduk

Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten. Dalam negara demokrasi pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah wajib menyediakan ruang bagi masyarakat menjadi subyek pembangunan, melalui partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Pelibatan masyarakat memiliki berbagai manfaat seperti sebagai bentuk transparansi, menyosialisasikan kerja pemerintah, serta meminimalisir potensi kekeliruan dalam penyusunan sebuah kebijakan. Masyarakat dengan pengetahuan tentang kondisi lingkungannya dapat memberikan nilai tambah pada rancangan kebijakan yang sudah dibuat pemerintah.

Pendataan awal Regsosek tahun 2022 akan menjadi gerbang untuk reformasi data perlindungan sosial Indonesia. Finalisasi pada hasil pendataan tersebut akan melibatkan partisipasi masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Dalam FKP akan dilakukan validasi silang antara hasil pengolahan dengan pengetahuan masyarakat, untuk kemudian diputuskan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Keterlibatan masyarakat diwakili oleh peserta FKP yang terdiri dari ketua satuan lingkungan setempat (SLS) atau perwakilan yang memahami keadaan masyarakat setempat serta lima orang perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua/ pengurus lembaga desa. Selain



itu diundang juga Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk membantu memberikan pengamanan.

Kegiatan FKP dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Palembang. Kegiatan FKP dipandu oleh seorang fasilitator dibantu oleh dua orang asisten fasilitator dan satu orang administrator. Kegiatan FKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 21 Mei 2023. Rekrutmen petugas FKP Regsosek di BPS Kota Palembang dilaksanakan tanggal 1 s/d 7 April 2023. Petugas yang direkrut adalah Fasilitator, Asisten Fasilitator dan Administrator.

Kegiatan FKP dipandu oleh seorang fasilitator dibantu oleh dua asisten fasilitator dan administrator yang dilakukan dari lurah ke lurah di wilayah tugasnya. Saat pelaksanaan FKP, peserta FKP diminta memeriksa kelompok kesejahteraan (sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin) hasil Pendataan Awal Regsosek 2022. Pada tahap berikutnya, rekomendasi perubahan kelompok kesejahteraan akan didiskusikan dalam forum sehingga diperoleh data Regsosek hasil FKP sesuai kesepakatan bersama. Ruang Lingkup Pada laporan Pengumpulan Data ini menjelaskan tentang seluruh proses kegiatan Pengumpulan Data Regsosek 2022 di Kota Palembang meliputi pengadaan instrumen, pelatihan petugas, pelaksanaan lapangan hingga proses monitoring dan evaluasi kegiatan lapangan sehingga kegiatan pengumpulan data Regsosek 2022 dapat berjalan dengan baik. Kegiatan FKP Regsosek di Kota Palembang dilakukan oleh 62 tim dengan total jumlah FKP sebanyak 396 FKP pada tanggal 2-19 Mei 2023. Secara umum, kegiatan FKP Regsosek di Kota Palembang berjalan dengan baik dan lancar.

Gambar 12. Kegiatan Forum Konsultasi Publik



Berdasarkan hasil kegiatan FKP Regsosek yang dilakukan di Kota Palembang, dapat disimpulkan beberapa rekomendasi diantaranya:

1. Pengujian model penentuan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan tidak miskin diharapkan melibatkan lebih banyak pihak eksternal seperti Instansiinstansi pemerintah daerah yang sering berhubungan dengan pendataan atau penyerahan bantuan kepada masyarakat sangat miskin atau miskin.
2. Pelaksanaan kegiatan pendataan lapangan yang bersifat sensus diharapkan tidak dilaksanakan berbarengan ataupun berdekatan jarak waktunya karena semakin meningkatkan kejenuhan dan potensi penolakan dari masyarakat karena pendataan yang terlalu sering

3.6.3. Penyusunan Disagregasi PMTB


PMTB merupakan salah satu komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB sendiri merupakan Program Prioritas Nasional, karena dibutuhkan data investasi fisik atau PMTB yang dirinci menurut sektor institusi dan lapangan usaha.

Survei PMTB bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data nasional lain yang terkait dengan investasi. Survei ini akan merekam investasi fisik yang dilakukan rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit, pemerintah dan desa. Di Kota Palembang, jumlah sampel sebanyak 28 dengan jadwal survei Maret hingga Juni 2023.

Dengan tersedianya data PMTB yang rinci, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

Persiapan pelaksanaan Survei PMTB tahun 2023 Kota Palembang berjalan sesuai rencana/jadwal yang telah disusun. Petugas diberikan pelatihan secara tatap muka bertempat di Hotel 101 Rajawali Palembang. Peserta Pelatihan Survei PMTB 2023 BPS Kota Palembang sebanyak 14 orang yang terdiri dari : Petugas Pengawas (PMS) sebanyak 5 orang; Petugas Pencacah Sampel (PCS) sebanyak 11 orang.

Pelaksanaan lapangan dijadwalkan Bulan Februari 2023. Pada tahap awal dilakukan listing/pendaftaran usaha/perusahaan. Kemudian selanjutnya dilakukan pencacahan pada usaha/perusahaan sampel terpilih. Baik listing maupun pencacahan menggunakan metode PAPI. Pengawasan pencacahan dilakukan oleh Pegawai Organik BPS Kota Palembang. Kecamatan yang didatangi berdasarkan ketersediaan dana yang ada serta kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan di kabupaten/kota. Pengumpulan data Survei PMTB 2023 di Kabupaten/Kota dilakukan seluruhnya oleh Petugas mitra sedangkan petugas organik sebagai pengawas/ pemeriksaan lapangan.



Kendala : Beberapa kendala dilapangan yang seringkali ditemui oleh petugas dilapangan :


1. Seringkali responden / Perusahaan yang menjadi target sampel menolak dengan berbagai alasan salah satunya responden terkendala waktu karena kesibukan pekerjaan.
2. Perusahaan yang menjadi target sampel pun kadang menolak dengan alasan karena pimpinan tidak berada ditempat, atau karena sudah menjadi responden dari survei kegiatan BPS lainnya sehingga dokumen yang harus diisi menyita waktu dan dianggap menambah beban pekerjaan mereka.
3. Petugas kesusahan mencari alamat responden atau Perusahaan yang baru menjadi sampel karena tidak dipasang karena terkadang tidak sesuai dengan alamat yang tercantum didalam daftar sampel / Direktori

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut antara lain :

1. Jika responden menolak biasanya akan dilakukan pendekatan langsung dengan memberikan penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan petugas BPS yang target sampelnya adalah Individu atau kelompok yang memiliki kriteria tertentu (syarat target sampel) misalnya memiliki usaha.
2. Jika Perusahaan yang menolak biasanya akan dicarikan sampel pengganti yang sudah ada dalam direktori perusahaan pengganti sampel utama.
3. Dilakukan pendampingan oleh Pengawas Organik BPS untuk kelancaran kegiatan pencacahan PMTB.

3.6.4. Statistik E-Commerce

Dalam buku Kajian Stabilitas Keuangan Semester I-2022 edisi Oktober 2022 yang dirilis BI, transaksi ekonomi dan keuangan digital memang semakin digandrungi dan makin meluas ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan menjadi preferensi serta kebiasaan baru. Kehadiran E-Commerce tidak hanya memberi andil dalam merubah pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, namun juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi individu-individu untuk menjadi enterpreneur yang ke depannya diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan. Tingginya potensi ekonomi digital telah mendorong



pemerintah untuk terus memantau dan memperbaharui regulasi terkait ECommerce. Untuk itu perlu ketersediaan data yang lebih lengkap dan dapat memetakan perkembangan E-Commerce di Indonesia, sebagai evidence based policy making dalam perumusan kebijakan dan pengambilan Keputusan

Metode pendataan E-Commerce yang akan dilakukan pada tahun 2023 2 adalah Go Digital, dengan berbasis CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), sehingga data dan informasi dapat dikumpulkan secara cepat, mudah, dan akurat at anytime and anywhere.

Tujuan dari kegiatan pengumpulan data e-commerce ini adalah:

- a. Melakukan pemutakhiran kerangka sampel usaha/perusahaan E-Commerce dengan berdasarkan hasil CAPI di wilayah yang terpilih sampel.
- b. Menyediakan indikator pokok yang terkait dengan E-Commerce (jumlah usaha, jenis barang dan jasa yang dijual, nilai transaksi, metoda pembayaran, serta cara pengiriman) yang merujuk pada konsep standar internasional dan indikator lainnya.c.
- c. Mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menyajikan volume dan nilai transaksi E-Commerce di Era Digital

Persiapan pelaksanaan Survei E-Commerce Tahun 2023 Kota Palembang berjalan sesuai rencana/jadwal yang telah disusun. Petugas diberikan pelatihan secara tatap muka pada tanggal 22 s.d. 25 Februari 2023 (2 hari efektif, 23 dan 24 Februari 2023) dan bertempat di The Alts Hotel Palembang. Peserta Pelatihan Survei E-Commerce 2023 BPS Kota Palembang sebanyak 14 orang yang terdiri dari : Petugas Pengawas (PMS) sebanyak 3 orang; Petugas Pencacah Sampel (PCS) sebanyak 11 orang.

Pelaksanaan lapangan dijadwalkan Bulan Maret - April 2023. Pada tahap awal dilakukan listing/pendaftaran usaha/perusahaan. Kemudian selanjutnya dilakukan pencacahan pada usaha/perusahaan sampel terpilih. Baik listing maupun pencacahan menggunakan metode CAPI (aplikasi fasih). Pengawasan pencacahan dilakukan oleh BPS Kota Palembang. Kecamatan yang didatangi berdasarkan ketersediaan dana yang ada serta kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan di kabupaten/kota. Pengumpulan data Survei E-Commerce 2023 di Kabupaten/Kota dilakukan seluruhnya oleh mitra sedangkan petugas organik sebagai pengawas/ pemeriksaan lapangan.


Meskipun terdapat banyak kendala penggunaan aplikasi fasih mobile, pendataan Survei E-Commerce BPS Kota Palembang bisa selesai tepat waktu sebelum batas akhir waktu pelaksanaan lapangan dan mencapai target 100 persen.

Tabel 20. Target dan Realisasi Sampel Survei E-Commerce 2023 BPS Kota Palembang

Kabupaten/Kota	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)
1671. BPS Kota Palembang	172	172

Gambar 13. Pengumpulan dan Pengawasan Data Statistik E--Commerce





Identifikasi Kendala Pelaksanaan Dalam setiap pelaksanaan kegiatan survei tentunya akan menemui kendala/permasalahan, berikut kendala-kendala dalam pelaksanaan Survei E-Commerce :

1. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan listing dan pengumpulan data adalah terdapat gangguan submit data aplikasi fasih karena masalah sinyal ataupun perangkat petugas yang kurang memadai. Perangkat petugas yang memorinya full bisa mengakibatkan aplikasi terus-terusan loading dan form kuesioner tidak muncul.
2. Masalah lain yang ditemui yaitu pada aplikasi fasih sering terjadi eror karena gangguan server pusat , contohnya di aplikasi petugas tidak muncul secara otomatis isian rinc. 1.01 s.d. 1.08 (kode wilayah prov s.d. NKS) namun masih bisa sukses submit data. Tapi setelah dicek di web fasih-sm ada warning 8 isian kosong (isian 1.01 s.d. 1.08 tadi yang tidak muncul otomatis).
3. Kendala lain yang ditemui adalah petugas kurang probing pada saat listing, sehingga masih ditemukan kekeliruan dimana pedagang yang terpilih sebagai sampel ternyata tidak melakukan perdagangan online dan hal ini baru diketahui pada saat pendataan. Tentunya ini mengakibatkan adanya pergantian sampel yang menyulitkan petugas pada saat pendataan lapangan mengingat rentang waktu antara listing dan pendataan lapangan cukup berdekatan.

Tindak Lanjut Berbagai masalah pada pelaksanaan Survei E-Commerce segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya agar tidak mempengaruhi kuantitas maupun kualitas output yang dihasilkan. Berikut tindak lanjut untuk setiap masalah/kendala pada pelaksanaan Survei E-Commerce :

1. Solusi untuk hp petugas yang bermasalah karena memori full yaitu meminta PCL untuk menghapus file file yang tidak penting atau jika memungkinkan mengganti hp. Untuk mengantisipasi masalah data hilang sebelum terkirim ke server, bagi petugas-petugas yang lokasi pendataannya jauh, susah sinyal ataupun hp kurang memadai disarankan bagi mereka untuk mencatat hasil listing dengan kuesioner cetak (kertas) sebagai backup data. Sementara itu, untuk kendala hp PML yang 16 bermasalah, PML direkomendasikan untuk .menginstal aplikasi LD Player agar fasih mobile bisa diakses melalui laptop sehingga proses pemeriksaan dan approving bisa berjalan lancar.

2. Mitigasi terhadap aplikasi fasih yang sering eror tersebut adalah segera membuat laporan ke tim IPD pusat agar segera bisa dicari solusinya.
3. Tindak lanjut masalah kesalahan pemilihan sampel adalah pencacah dan pengawas harus cepat dan aktif melaporkan ke KF Stat Distribusi jika ada kesalahan pemilihan sampel agar segera dilakukan prosedur penggantian sampel

3.6.5. Statistik Tanaman Pangan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya peran tersebut, dibutuhkan informasi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam penghitungan produksi tanaman pangan adalah data luas panen dan produktivitas. Data luas panen bersumber dari laporan Statistik Pertanian (SP) yang dikumpulkan setiap bulannya oleh Mantri Tani tiap kecamatan. Data produktivitas dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan

Pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui Survei Ubinan. Secara garis besar pelaksanaan Survei Ubinan terbagi menjadi 2 yaitu pemutakhiran daftar rumah tangga dan pelaksanaan ubinan.

Tabel 21. Rekap Pemutakhiran Sampel Rumah Tangga Ubinan

Alokasi Blok Sensus	SR 1 2023	SR 2 2023	SR 3 2023	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah	8	6	16	30

Pada tahun 2023 jumlah blok yang dimutakhirkan sebanyak 20 blok sensus dengan target sampel sebanyak 30 rumah tangga. Namun realisasinya, pada subround 1 terpenuhi 8 sampel, pada subround 2 hanya 4 sampel dan subround 3 hanya 5 sampel. Jadi total realisasi untuk ubinan palawija adalah 17 sampel rumah tangga. Kemudian

dalam ubinan padi tahun 2023 dilakukan metode ubinan berbasis KSA. Dalam praktiknya, ubinan KSA lebih mudah dilaksanakan karena kita sudah mengetahui lokasi ubinan meskipun belum mengetahui pengelola sehingga pemantauan sawah lebih mudah dilakukan.

Tabel 22. Target dan Realisasi Sampel Ubinan Padi


Jenis Tanaman	Target SR 1 2023	Realisasi SR 2 2023	Target SR 2 2023	Realisasi SR 2 2023	Target SR 2 2023	Realisasi SR 3 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah	3	3	31	46	103	81

3.6.6. Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode KSA

Pemerintah Indonesia sangat gencar melancarkan program-program yang berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian dalam upaya mendukung salah satu cita-cita nawacita yaitu terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Oleh sebab itu, tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat sangat dibutuhkan sebagai sumber referensi kebijakan pertanian yang tepat sasaran, maka perbaikan metodologi dalam pengumpulan data pertanian harus dilakukan.

Selama ini pengumpulan data luas panen masih menggunakan metode konvensional, yaitu hasil pandangan mata petugas (*eye estimate*). Meskipun penggunaan metode tersebut mudah diterapkan tetapi penggunaan metode tersebut mengakibatkan rendahnya akurasi dan lamanya waktu yang dibutuhkan.

Perbaikan metodologi pengumpulan data pertanian yang dilakukan oleh BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk Menyusun kerangka sampel dan system pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi guna memperbaiki metodologi pengumpulan data luas panen sebelumnya. Pengumpulan data luas panen dengan metode KSA ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern serta melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang diperoleh lebih akurat dan tepat waktu.



Jumlah petugas yang terlibat dalam kegiatan Survei KSA 20223 di Kota Palembang adalah 6 PCS dan 2 PMS. Petugas Survei KSA 2023 menggunakan mitra BPS yang telah terdaftar pada Sobat BPS.

Alokasi petugas KSA memperhatikan banyaknya segmen yang akan dicacah, jarak, wilayah domisili petugas dan waktu penyelesaiannya sehingga petugas dapat menyelesaikan pekerjaan di lapangan dengan cepat. Secara umum, jumlah segmen KSA sebanyak 41 segmen dengan rincian KSA Padi sebanyak 25 segmen dan KSA Jagung sebanyak 16 segmen.

Kendala yang Dialami Terdapat beberapa kendala yang dialami, seperti:


1. Ada beberapa segmen KSA Padi yang sulit dikunjungi karena kondisi lapangan banjir;
2. HP Petugas memorinya penuh sehingga ketika proses pengambilan foto amatan menjadi lambat.

Pengawasan Lapangan Pengawasan/pemeriksaan dilakukan oleh PMS untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pemeriksaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Pemeriksaan/pengawasan dalam kegiatan KSA 2023 bertujuan untuk:

1. Menjamin agar PCS melakukan tugasnya sesuai dengan jadwal waktu, tata cara dan instruksi yang telah dilakukan;
2. Menjamin kebenaran dan keabsahan hasil pelaksanaan lapangan yang dilakukan oleh PCS;
3. Menjamin agar PCS selalu berpegang teguh pada buku Pedoman Pencacah KSA Padi dan Jagung 2023, terutama konsep dan definisi yang digunakan.

PMS harus melakukan pengawasan terhadap hasil pengamatan yang dilakukan PCS yang diawasinya selama rentang waktu pengamatan. Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: melalui pengawasan secara langsung ke lokasi segmen, dan monitoring pelaksanaan KSA 2023. Monitoring KSA jagung dapat dilakukan melalui aplikasi KSA Jagung dan website <https://ksa.bps.go.id/jagung>. Sementara untuk KSA padi dapat dilakukan pada aplikasi KSA padi dan website <https://ksapromanajemen.bps.go.id>.

Adapun saran bagi kegiatan Survei KSA 2023 yang telah dilaksanakan di BPS Kota



Palembang sebagai gambaran untuk kegiatan survei berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap petugas yang dilibatkan harus dilakukan dengan perekrutan yang baik, agar didapatkan petugas yang berdedikasi dan berloyalitas tinggi agar diperoleh data yang berkualitas;
2. Setiap tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan Survei KSA 2023 harus dilaksanakan secara tepat dan benar sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan saat pelatihan;
3. Petugas yang terlibat harus memiliki pemahaman konsep yang baik sehingga pendataan lapangan Survei KSA 2023 ini bisa berjalan lancar;
4. Hasil amatan di lapangan oleh petugas sebaiknya langsung diperiksa oleh pengawas sehingga jika ada kesalahan langsung bisa dikoreksi

3.7. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Realisasi penggunaan anggaran BPS Kota Palembang tahun 2023 mencapai 99,50 persen dengan rincian yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS menyerap anggaran sebesar 99,52 persen terhadap total pagu dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik menyerap dana sebesar 99,48 persen terhadap total. Angka tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 99,53 persen. Adapun realisasi penggunaan anggaran BPS Kota Palembang selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2023

Program	Pagu 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi /Pagu (%)	Kontribusi thd Realisasi Total (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>			<i>(4)</i>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	7.169.890.000	7.134.596.807	99,51	47,63
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	7.887.693.000	7.846.363.395	99,48	52,37
Total	15.057.583.000	14.980.960.202	99,49	100

Sumbangan terbesar anggaran berasal dari Program PPIS dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.887.693.000,- dan realisasi Rp. 7.846.363.395,-. Kontribusinya terhadap realisasi total sebesar 52,37 persen. Sedangkan program DMPTTL memberikan kontribusi terhadap realisasi anggaran sebesar 47,63 persen, dengan jumlah Pagu anggaran sebesar Rp. 7.169.890.000,- dan realisasi Rp. 7.134.596.807,-.

Pada awal tahun 2023 BPS Kota Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp. 18.378.781.000,-. Selama perjalanan waktu anggaran tersebut direvisi sehingga pada akhir Desember 2023 anggaran BPS Kota Palembang menjadi Rp. 15.057.583.000,-. Terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.321.198.000,-. Penghematan anggaran tersebut pada kegiatan Sensus Pertanian, Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi dan kegiatan PODES ditiadakan dan lain-lain. Penghematan anggaran BPS Kota Palembang terbesar pada akun belanja honor output kegiatan dengan potensi penghematan sebesar Rp. 2.482.124.000,- sedangkan potensi penghematan terkecil pada akun bahan yaitu hanya sebesar Rp. 8.000.000,-. Potensi penghematan BPS Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Potensi Penghematan BPS Kota Palembang Tahun 2023

Kode Akun	Akun	Pagu Semula (Rp)	Pagu Menjadi (Rp)	Potensi Penghematan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.661.407.000	1.500.283.000	2.161.124.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	717.943.000	42.118.000	675.825.000
521211	Belanja Bahan	397.375.000	279.419.000	117.956.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.000.000	-	8.000.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	517.145.000	190.952.000	326.193.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32.100.000	-	32.100.000
Total		5.333.970.000	2.012.772.000	3.321.198.000

Gambar 14. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023



Pada gambar diatas dapat terlihat perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Tahun 2020 terlihat bahwa dengan realisasi anggaran yang terkecil, BPS Kota Palembang hanya dapat memperoleh capaian kinerja sebesar 102,88 persen. Kemampuan ini masih dapat ditolerir karena pada tahun 2020 merupakan pelaksanaan awal Renstra 2020-2024. Selama 4 tahun tersebut dapat diteliti bahwa tahun 2023 BPS

Kota Palembang mampu memperoleh capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 107,84 persen, dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil dibanding tahun 2021 dan 2022. Ini mengindikasikan bahwa Tahun 2023 BPS Kota Palembang lebih efisien dalam penggunaan anggarannya sedangkan hasil yang diperoleh capaian kinerja yang lebih baik.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPS Kota Palembang dapat dilihat pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran dikelompokkan 5 kategori yaitu :

1. Sangat Baik jika nilai kinerja anggaran lebih dari 90 persen;
2. Baik jika nilai kinerja anggaran lebih dari 80 persen sampai dengan 90 persen;
3. Cukup jika nilai kinerja anggaran lebih dari 60 persen sampai dengan 80 persen;
4. Kurang jika nilai kinerja anggaran lebih dari 50 persen sampai dengan 60 persen;
5. Sangat Kurang jika nilai kinerja anggaran sampai dengan 50 persen;

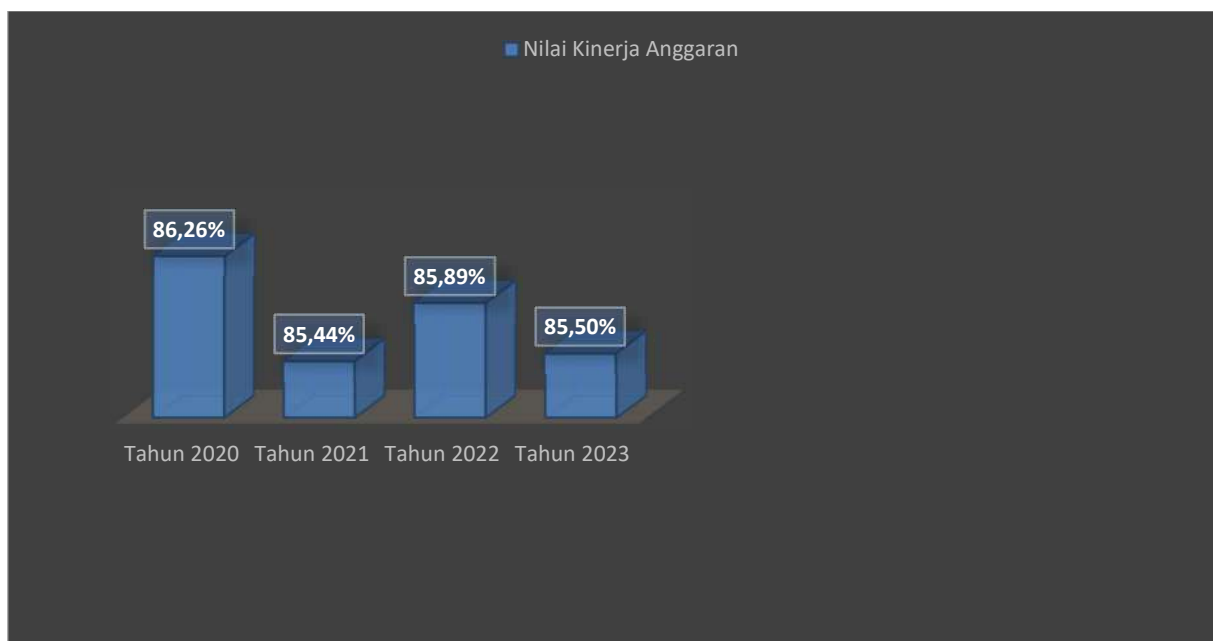
Pada tahun 2023 BPS Kota Palembang mendapat nilai kinerja 85,50, termasuk dalam kategori baik (dapat dilihat pada gambar dibawah)

Gambar 15. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPS Kota Palembang Tahun 2023 pada Aplikasi SMART Kementerian Keuangan



Jika dibandingkan selama 4 tahun, nilai kinerja BPS Kota Palembang mengalami fluktuatif. Nilai kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan nilai kinerja 86,26, akan tetapi menurun di tahun 2021 dan 2022 menjadi 85,80 dan 85,44. Dan meningkat kembali di Tahun 2023 dengan nilai kinerja 85,50. Perbandingan Nilai Kinerja Smart Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 16. Perbandingan Nilai Evaluasi Kinerja (Smart) BPS Kota Palembang Tahun 2020 s.d 2023



Dalam rangka meningkatkan nilai Kinerja Smart ini BPS Kota Palembang dapat melakukan strategi yaitu :

1. Penggunaan anggaran dapat lebih hemat dengan target RVRO/output yang lebih maksimal
2. Dengan realisasi anggaran belum 100 persen, Target RVRO sudah tercapai maksimal

Diharapkan melalui strategi tersebut pada tahun yang akan datang BPS Kota Palembang dapat meningkatkan kembali nilai kinerja smartnya.

Visi besar dari pemerintah adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya adalah peningkatan

efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output. Artinya, pemerintah harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan, harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, utamanya meningkatkan kesejahteraan.

Efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran BPS Kota Palembang harus berusaha melalui berbagai upaya, seperti penyempurnaan *cascading* kinerja hingga level individu; penyelesaian target kinerja tingkat pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan seluruh OPD atau *cross-cutting* program; monitoring dan evaluasi berkala atas kinerja untuk mendorong pencapaian kinerja.

BPS Kota Palembang telah berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan cara seminimal mungkin dalam penggunaan anggaran untuk memperoleh hasil yang maksimal. Efisiensi yang telah dilaksanakan BPS Kota Palembang sesuai dengan tujuan dan sasaran seperti terlihat pada tabel di bawah

Tabel 25 Capaian Kinerja, Realisasi dan Nilai Efisiensi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Kegiatan/Output	Capaian Kinerja (%)	Pagu 2023	Realisasi 2023	Realisasi Anggaran (%)	Nilai Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
T.1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			100	7.853.773.000	7.812.625.395	99,47	51,31
	S1.1 Meningkatnya pemanfaatan data		100	7.853.773.000	7.812.625.395	99,47	51,31

statistik yang berkualitas	2896.BMA.004. Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	2.700.000	2.640.000		
	2898.BMA.007 Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	38.174.000	37.479.000		
	2898.QMA.007 Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	16.951.000	16.929.800		
	2899.BMA.006 Publikasi/Laporan Neraca Produksi	47.437.000	47.389.438		
	2900.BMA.005 Dokumen, Laporan dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	49.480.000	49.270.000		
	2902.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	47.188.000	47.111.000		
	2903.BMA.009 Publikasi/Laporan Statistik Harga	536.079.000	530.339.130		
	2904.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	212.997.000	211.942.913		
	2905.BMA.004 Publikasi/Laporan SAKERNAS	208.964.000	207.959.000		
	2905.BMA.005 Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	159.630.000	155.780.529		
	2906.BMA.006 Publikasi/Laporan SUSENAS	468.792.000	465.695.100		
	2907.BMA.006 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	12.042.000	12.026.400		
	2907.QMA.009 Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Eko	3.054.893.000	3.048.642.299		
	2908.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata yang Terbit Tepat Waktu	153.785.000	152.467.000		
	2908.BMA.004 Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	21.894.000	21.374.000		
	2909.BMA.005 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	3.425.000	2.670.000		
	2910.BMA.008 Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan	4.836.000	0		
	2910.QMA.006 Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	2.282.407.000	2.278.897.786		
	2910.QMA.007 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	28.147.000	24.180.000		
	2910.QMA.010 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan KSA	65.762.000	64.172.000		
2910.RAN.004. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	438.200.000	435.660.000			

T.2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN		114,79	30.920.000	30.798.000	99,61	87,96
	S2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		30.920.000	30.798.000	99,61	87,96
	2897.BMA.004 Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik		30.920.000	30.798.000		
T.3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		120	3.000.000	2.940.000	98,00	100
	S3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	120	3.000.000	2.940.000	98,00	100
	2897.BDB.003 Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		3.000.000	2.940.000		
T.4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		102,64	7.169.890.000	7.134.596.807	99,51	57,80
	S4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		7.169.890.000	7.134.596.807	99,51	
	Seluruh Program Dukungan Manajemen		7.169.890.000	7.134.596.807		
Total		107,84	15.057.583.000	14.980.960.202	99,49	70,86

Upaya –upaya efisiensi yang telah dilakukan BPS Kota Palembang :

1. Telah dilayangkan nota dinas untuk penghematan listrik, air dan bahan ATK
2. Telah dipasang himbuan agar dapat hemat energi listrik dan air

“Ayo..... hemat energi matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan kalau bukan kita siapa lagi”.

“Gunakan air secukupnya dan seperlunya saja”

Himbuan ini juga memotivasi pegawai untuk mematikan listrik, laptop, komputer, printer , dispenser, mesin penghancur kertas, setiap setelah selesai bekerja.

Dan tahun 2022 BPS Kota Palembang telah menata ulang toilet , tempat penampungan air telah diganti dengan kran. Penampungan air yang besar seringkali membuat lupa pegawai untuk mematikan kran air. Dengan penggunaan kran air setiap pegawai hanya dapat menggunakan air sesuai dengan keperluan saja.

3. Pada era digital ini juga berdampak ke BPS Kota Palembang, kebijakan *paperless* yang telah dilakukan seperti penggunaan aplikasi musu, satu bps kota palembang, kippapp, whatsapp bot dan lain-lain telah dapat mengurangi penggunaan kertas dan tinta.
4. Setiap kertas bekas yang tidak digunakan lagi tidak dibuang ke mesin penghancur

kertas, tapi dapat disimpan dan digunakan apabila diperlukan untuk pembuatan konsep Penggunaan kertas bekas juga dapat menghemat penggunaan kertas.

Apabila dilihat dari realisasi anggaran, upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh seluruh pegawai BPS Kota Palembang terlihat penurunan anggaran di BPS Kota Palembang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26 Penurunan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terhadap Tahun 2022

Akun	Nama Akun	Tahun 2023	Tahun 2022	Keterangan
521111	Biaya Keperluan Perkantoran	282.055.713	302.231.617	Terdapat pengurangan sebesar 6,67 persen atau Rp. 20.175.904,- biaya keperluan perkantoran seperti alat-alat tulis kantor, biaya makan dan minum untuk rapat, materai dsb.
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	34.000	79.000	Terdapat penurunan sebesar 56,96 persen dari tahun sebelumnya
522113	Beban Langganan air	1.831.202	2.170.440	Terdapat pengurangan 15,63 persen dari tahun sebelumnya.
521211	Belanja Bahan	600.041.599	1.402.405.971	Terdapat pengurangan 57,21 persen merupakan imbas dari kebijakan paperless sehingga menurunkan belanja bahan sebesar Rp. 802.364.372,-
523111	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	93.617.094	96.152.813	Terdapat pengurangan Rp.2.535.719,- atau 2,64 persen dari tahun sebelumnya




BAB IV. PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). BPS Kota Palembang sejalan dengan keinginan reformasi birokrasi telah berusaha untuk menghasilkan data yang terpercaya, beragam dan berkualitas. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap data BPS. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan karena merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi berbagai program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Palembang secara umum menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Kesimpulan ini tercermin dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Palembang Tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja BPS Kota Palembang menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai capaian kinerja sebesar 107,84 persen. Terdapat 4 indikator yang capaian kinerjanya diatas 100 persen, yaitu :

1. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dengan capaian kinerja 120 persen, realisasi 146,15 persen dan target 53 persen
2. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik dengan capaian kinerja 120 persen, realisasi 170,97 persen dan target 96 persen
3. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dengan capaian kinerja 109,59 persen, realisasi 92,31 persen dan target 84 persen.
4. Indikator Hasil penilaian implementasi SAKIP dengan capaian kinerja 105,28 persen,



realisasi 74,75 poin dan target 71 poin

Sedangkan 3 indikator lainnya dengan capaian kinerja 100 persen.

4.2. Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023, BPS Kota Palembang tetap melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Dinas Kominfo Palembang dengan menerapkan strategi dan rencana aksi agar nilai Sakip yang akan datang akan lebih baik, yaitu :

- 1 Tetap berkontribusi dalam setiap rapat yang diadakan oleh instansi lain baik sebagai narasumber ataupun peserta rapat dalam rangka memperkenalkan data BPS
- 2 Selama ini data inflasi hanya di upload di website BPS Kota Palembang dalam bentuk Berita Resmi Statisti (BRS). Tahun 2024 BPS Kota Palembang akan melakukan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) inflasi secara offline dan online melalui streaming kanal Youtube.
- 3 Tetap melakukan workshop Satu Data Palembang dengan jumlah OPD yang lebih banyak.
- 4 Tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo Palembang pada awal tahun, sehingga jumlah OPD yang menyampaikan metadata sektoral lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
- 5 Melanjutkan pendampingan dalam pelaksanaan dan penyusunan metadata sektoral
- 6 Membuka konsultasi metadata statistik bagi dinas yang membutuhkan.
- 7 Menambah SDM dalam penyelenggaraan statistik sektoral
- 8 Memfasilitasi para pembina data dengan laptop
- 9 Melakukan pembinaan statistik kepada OPD melalui FGD atau sosialisasi yang dilaksanakan BPS Kota Palembang
- 10 Menawarkan kegiatan-kegiatan statistik sektoral ke setiap OPD untuk dibuatkan rekomendasi



LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhistira Arya Noegraha, S.Si., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

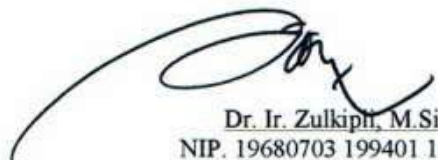
Nama : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
NIP. 19680703 199401 1 001

Palembang, 24 Januari 2023
Pihak Pertama


Yudhistira Arya Noegraha, S.Si., M.Si
NIP. 19770718 199901 1 001

Lampiran 1.Reviu Renstra BPS Kota Palembang 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi Pembangunan nasional (%)	58,28	75,00	100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Seksi IPDS
		Persentase publikasi statistic yang menerapkan standard akurasi			100	100	100	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Seksi IPDS
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik			41	50	50	Fungsi IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadada sektoral dan khusus sesuai standar			76	76	76	Fungsi IPDS
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)			92	92	92	Seksi Sosial, Produksi, Distribusi, dan NWAS, Seksi IPDS
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang Unggul dan Berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan	Hasil Penilaian implementasi SAKIP	69	70	70	70	71	Subbagian Umum
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS Propinsi	80	85	100	100	100	Subbagian Umum

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudhistira Arya Noegraha, S.Si., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama

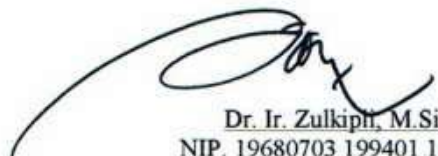
Nama : Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Ir. Zulkipli, M.Si
NIP. 19680703 199401 1 001

Palembang, 24 Januari 2023
Pihak Pertama


Yudhistira Arya Noegraha, S.Si., M.Si
NIP. 19770718 199901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	53
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	84
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	96
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	71
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	100



Program	Anggaran
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 11.656.864.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 6.721.917.000,-
Jumlah	Rp. 18.378.781.000,-

Pihak Kedua

Ir. Zulkipli, M.Si
NIP. 196807031994011001

Palembang, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

Yudhistira Arya Noegraha, S.Si, M.Si
NIP. 197707181999011001

Lampiran1. Pengukuran Capaian Kinerja BPS Kota Palembang 2023

Tujuan/Sasaran/Indikator	PK									Capaian Kinerja							
	Satuan	Target				Realisasi				Kumulatif			Terhadap target setahun				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	TW IV	
PK dan IKU																	
T1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan																
1.1.	Meningkatnya Pemanfaatan data statistic yang berkualitas																
	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan Evaluasi Pembangunan nasional	Persen	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan Evaluasi Pembangunan nasional	Persen	14	43	43	100	14	43	57	100	100	100	120	14	43	57	100
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN																
2.1.	Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN																
	Persentase K/L/D/I yang Melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	0	15	15	53	0	0	23	146	0	0	120	0	0	43	120
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sectoral dan khusus sesuai standar	Persen	0	0	0	84	0	0	7,69	92,31	0	0	0	0	0	9,13	109,59
T3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN																
3.1	Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I																
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	96	96	96	96	170,97	170,97	170,97	170,97	120	120	120	120	120	120	120
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi																
4.1	SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan																
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	0	0	0	71	0	0	0	74,75	0	0	0	0	0	0	105,28
4.2	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana Pelayanan BPS	Persen		0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	100	100

Lampiran 4

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS KOTA PALEMBANG
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2023**

No	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BPS Kota Palembang	-	20	17	2	5	-	-	44

Lampiran 5. Kegiatan BPS Kota Palembang 2023

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN DASAR 2010=100												
2	SKPS												
3	SKKRT												
4	SKSPPI												
5	SKLNP												
6	SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB												
7	SKLNPRT												
8	PDRB PENGELUARAN												
9	PENYUSUNAN PDRB TAHUNAN DAN TRIWULANAN MENURUT PENGELUARAN TAHUN DASAR 2010=100												
10	PEMUTAKHIRAN SISTEM DAN PROGRAM MFD DAN MBS BERBASIS WEB												
11	SURVEI WAKTU TUNGGU DWELLING TIME DI PELABUHAN												
12	SKSIP												
13	SURVEI PJ-2.5												
14	SURVEI SIMOPPEL												
15	SURVEI ANGKURAN UDARA (BANDARA)												
16	SURVEI ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG DITERMINAL DAN JEMBATAN TIMBANG												
17	SVK												
18	SURVEI HARGA PERDAGANGAN BESAR												
19	SVEB												
20	SKHR IDUL FITRI												
21	SKHR NATAL DAN TAHUN BARU												
22	HPS DAN HPJ												
23	INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI												
24	BOQ												
25	VHT-S												
26	VHT-L												

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
27	VREST-UMB												
28	BUMD												
29	APBD												
30	K2												
31	BCS												
32	UPDATING DIREKTORI PENYEDIA JASA PARIWISATA												
33	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) SEMESTERAN												
34	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS) TAHUNAN												
35	KOMUTER												
36	SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL												
37	SERUTI												
38	PENYUSUNAN STATISTIK POLITIK KEAMANAN												
39	SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI												
40	SENSUS PERTANIAN												
41	SURVEI KONSTRUKSI												
42	IBS BULANAN												
43	IBS TAHUNAN												
44	IMK TAHUNAN												
45	IMK TAHUNAN												
46	SURVEI PERTAMBANGAN, ENERGI, PENGGALIAN, CAPTIVE POWER, DAN UPDATING DIREKTORI												
47	SURVEI PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN RPH/TPH												
48	SURVEI PERUSAHAAN PERIKANAN,TPI/PPI/PP												
49	SURVEI PERUSAHAAN KEHUTANAN												
50	SURVEI PERTANIAN TANAMAN PANGAN/UBINAN												
51	SURVEI HORTIKULTURA DAN INDIKATOR PERTANIAN												
52	SURVEI PERUSAHAAN PERKEBUNAN												
53	PENDATAAN STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN METODE KERANGKA SAMPEL AREA												

Lampiran 6

RESPONRATE SURVEI BPS KOTA PALEMBANG 2023

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari	190	179	94,21
2	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	754	736	97,61
3	Survei Komuter	1.380	1.357	98,33
4	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor Dan Konsumsi	860	846	98,37
5	Penyusunan Statistik Politik Keamanan	1	1	100
6	Survei Perilaku Anti Korupsi	80	80	100
7	Seruti	800	798	99,75
8	Sensus Pertanian	4241	4.241	100
9	Gas	2	2	100
10	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	132	132	100
11	Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan	84	85	101,19
12	VIMK Tahunan	419	419	100
13	VIMK Triwulanan	752	752	100
14	Survei Tahunan Pertambangan Non Minyak dan Gas Bumi	3	3	100
15	Listrik	2	2	100
16	PDAM	3	3	100
17	Captive Power	162	162	100
18	Updating Perusahaan Konstruksi	100	100	100
19	Survei Kontruksi Triwulanan	233	232	99,57
20	Survei Konstruksi Tahunan	131	131	100
21	Survei Konstruksi Perorangan	50	50	100
22	Survei LPTB	12	12	100
23	Survei PPI	4	4	100
24	Survei Perusahaan Kehutanan Tahunan	14	10	71,43
25	Tanaman Pangan Ubinan	150	147	98
26	KSA Padi	300	300	100
27	KSA Jagung	192	192	100
28	Survei Holtikultura dan Indikator Pertanian	702	702	100
29	SAPB	8	8	100
30	STKU	135	135	100
31	Survei Waktu Tunggu Dwelling Time di Pelabuhan	52	52	100
32	Poldis	23	23	100
33	SPAW	208	208	100
34	Survei PJ-2.5	1	1	100
35	Survei Simoppel	12	12	100
36	Survei Angkatan Udara (Bandara)	12	12	100

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Survei Profil Pasar	78	78	100
36	SUCI	133	133	100
37	SHK (HK-4/5)	1.080-	1.080	100
38	HK 1.1	1284	1284	100
39	HK 1.2	936	936	100
40	HK 2.1	1476	1476	100
41	HK 2.2	1248	1248	100
42	HK 3	3000	3000	100
43	HK 6	312	312	100
44	HPB	1320	1320	100
45	SVPEB	80	80	100
46	SVK	50	50	100
47	SKHR Idul Fitri	4	4	100
48	SKHR Natal dan Tahun Baru	4	4	100
49	HPS	240	240	100
50	HPJ	180	180	100
51	IKK	166	166	100
52	SHMP	20	20	100
53	SHPP	5	5	100
54	SPDT IHPB	504	504	100
55	BOQ	6	6	100
56	BUMD	15	15	100
57	VREST UMB	322	322	100
58	VHTS	1393	1393	100
59	VHTL	237	237	100
60	Survei Lembaga Keuangan Koperasi	72	72	100
61	Survei Lembaga Keuangan Valas	8	8	100
62	Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata	33	33	100
63	BCS (Business Characteriistic survey)/SKU	66	66	100
64	VDTW	18	18	100
65	K2	1	1	100
66	APBD	1	1	100
67	Updating Direktpri Dinas	4	4	100
68	SKSPPI	30	30	100
69	SKPS	8	8	100
70	SKLNPRT	40	40	100
71	SKLNP	6	6	100
72	UPDATING DIREKTORI LNPRT	10	10	100
73	LRA	4	4	100

No	Nama Survei	Target Sampel	Realisasi	Response Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74	SKSIP	1	1	100
75	PDRB Pengeluaran	5	5	100
76	Disagregasi PMTB	108	108	100
77	SKTNP Barang	16	16	100
78	SKTNP Jasa	68	68	100
79	SKSJ	5	5	100
80	SKNP	35	35	100
81	SEEA	9	9	100

Lampiran 7

Judul Publikasi ARC BPS Kota Palembang

No.	Judul	Periode Terbit	Bahasa	Jadwal Rilis	Status
1	Kota Palembang Dalam Angka 2022	Tahunan	Indonesia dan Inggris	28 Feb.2022	Rilis Tepat Waktu
2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022	Tahunan	Indonesia dan Inggris	5 Apr. 2022	Rilis Tepat Waktu
3	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang Menurut Pengeluaran 2018-2022	Tahunan	Indonesia	28 Apr.2022	Rilis Tepat Waktu
4	Kecamatan Seberang Ulu I Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
5	Kecamatan Alang-alang Lebar Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
6	Kecamatan Kertapati Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
7	Kecamatan Plaju Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
8	Kecamatan Kalidoni Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
9	Kecamatan Gandus Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
10	Kecamatan Ilir Timur I Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
11	Kecamatan Bukit Kecil Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
12	Kecamatan Ilir Timur II Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
13	Kecamatan Sukarami Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
14	Kecamatan Sematang Borang Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
15	Kecamatan Ilir Barat II Dalam Angka Tahun 2022	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
16	Kecamatan Kemuning Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
17	Kecamatan Jakabaring Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
18	Kecamatan Sako Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
19	Kecamatan Ilir Barat I Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
20	Kecamatan Seberang Ulu II Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
21	Kecamatan Ilir Timur III Dalam Angka Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	26 Sept.2023	Rilis Tepat Waktu
22	Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	Tahunan	Indonesia	28 Des.2023	Rilis Tepat Waktu
23	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Palembang 2023	Tahunan	Indonesia	8 Desember 2023	Rilis Tepat Waktu

Judul Publikasi Non ARC BPS Kota Palembang

No.	Judul	Jadwal Rilis	Status
1	Statistik Daerah Kota Palembang 2023	26 Sept.2023	Rilis
2	Statistik Ketenagakerjaan Kota Palembang 2022	29 Des.2023	Rilis
3	Indikator Kesejahteraan Kota Palembang Tahun 2023	29 Des.2023	Rilis
4	Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023-Tahap 1 Kota Palembang	15 Des 2023	Rilis
5	Buklet Hasil Pencacahan Langka Sensus Pertanian 2023 -Tahap 1 Kota Palembang	4 Des 2023	Rilis
6	Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kota Palembang	10 Feb 2023	Rilis
6	Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2022	3 Feb 2023	Rilis
7	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palembang 2022	2 Jan 2023	Rilis

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**

Jl. P.A.K. Abdul Rohim No 2 Kel. Talang Semut Palembang
Telp/fax : 0711-352184, email : bps1671@bps.go.id